



**EFEKTIVITAS PENGAWASAN INSPEKTORAT
TERHADAP KINERJA BADAN PERENCANAAN DAN
PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PERENCANAAN
INFRASTRUKTUR JALAN DI KABUPATEN
MUARA ENIM**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Sosial
Program Studi Ilmu Politik**

Oleh:

LENSI SANTIKA

NIM: 1710702008

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
TAHUN 2021**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth

Bapak Dekan Fak. Ilmu sosial Dan
Ilmu politik, UIN Raden Fatah

Di

Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah mengadakan bimbingan dengan sungguh-sungguh, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Lensi Santika dengan NIM. 1710702008 yang berjudul **"Efektivitas Pengawasan Inspektorat Terhadap Kinerja Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Dalam Perencanaan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Muara Enim"** sudah dapat diajukan dalam sidang munaqosah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang. Demikian, TerimaKasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb

Palembang, 22 Juli 2021

Pembimbing I

Pembimbing II



Taufik Akhyar, M.Si.

NIP. 197101932000031003



Reni Apriani, M.Si

NIDN. 2021049401

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : Lensi Santika
Nim : 1710702008
Jurusan : Ilmu Politik
Judul : Efektivitas Pengawasan Inspektorat Terhadap Kinerja Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Dalam Perencanaan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Muara Enim

Telah dimunaqosahkan dalam sidang terbuka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang.

Hari / Tanggal : Selasa / 03 Agustus 2021

Tempat : Secara Daring Menggunakan Zoom

Dan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1) pada Jurusan Ilmu Politik.

Palembang, 03 Agustus 2021



Prof. Dr. H. Izomiddin, M.A

NIP. 196206201988031001

TIM PENGUJI

KETUA

SEKRETARIS

Dr. Eti Yusnita, S.Ag M.Hi
NIP. 197409242007012016

Ryllian Chandra, M.A
NIP. 1986040520190301011

PENGUJI 1

PENGUJI 2

Prof. Dr. H. Izomiddin, M.A
NIP. 196206201988031001

Yulion Zalpa, M.A
NIP. 198807072019031011

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lensi Santika
Tempat & Tanggal Lahir : Mekar Jaya, 21 Maret 1999
NIM : 1710702008
Jurusan : Ilmu Politik
Judul skripsi : Efektivitas Pengawasan Inspektorat Terhadap Kinerja Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Dalam Perencanaan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Muara Enim.

Menyatakan dengan soesungguhnya, bahwa :

1. Seluruh data, informasi, pembahasan, dan kesimpulan yang disajikan dalam skripsi ini kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang telah ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut di atas, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan gelar akademik yang saya peroleh melalui pengajuan skripsi ini.

Palembang, 15 Juli 2021
Yang Membuat Pernyataan



Lensi Santika
NIM.1710702008

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Memulai dengan penuh keyakinan, Menjalankan dengan penuh keikhlasan,
Menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan”

PERSEMBAHAN

Karya tulisku ini kupersembahkan kepada :

- **Ayahanda Tersayang Wiryadi**
- **Ibunda Tercinta Elni Yunani**
- **Ayuk ku Feni Susanti S.Pd , Adik ku Ferdika Nanda Maulana, dan Adik Bungsu Anggi Okta Nada.**
- **Kakak yang selalu memberi semangat dan juga dukungan (kak Adi)**
- **Dan juga kakak panutan kami (Kak Ahmad Dailani S,Sos)**
- **Sahabatku (Kiki Leonita, Genta Tiara Esawela, Vetri Yulianti, Maya Sari, Fadillah Indriyani, Niken Febriani, Dwi Monica Lwensky, Indah Lestari)**
- **Seluruh Sahabatku Ilmu Politik Angkatan 2017**
- **Almamaterku UIN Raden Fatah Palembang.**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Assalammu'alaikum wr.wb.

Alhamdulillah rabbil'alamiin, Puji dan syukur saya ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat taufiq, hidayah serta 'inayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat serta salam, tak lupa juga kita limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, kerabat, dan sahabatnya, berkat perjuangan beliau yang telah mengubah peradaban dunia dari masa kebodohan menuju masa yang dipenuhi dengan perkembangan ilmu serta teknologi, sehingga manusia mampu untuk bertikir dan bertindak sesuai dengan sunnahnya.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat serta guna memperoleh gelar sarjana Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang, dengan judul skripsi ini ialah "Efektivitas Pengawasan Inspektorat Terhadap Kinerja Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Dalam Perencanaan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Muara Enim", dalam menyelesaikan skripsi ini begitu banyak kesulitan namun berkat hidayah dari Allah SWT dan doa dari berbagai pihak serta bimbingan dari pembimbing skripsi saya yang telah dengan sabar membimbing saya dalam skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Nyanyu Khodijah, S.Ag., M.A sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
2. Prof. Dr. Izomiddin, MA sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang.
3. Dr. Yenrizal, M.Si sebagai Wakil Dekan I FISIP UIN Raden Fatah Palembang
4. Ainur Ropik, S.Sos., M.Si sebagai Wakil Dekan II FISIP UIN Raden Fatah Palembang
5. Dr. Kun Budianto, M.Si sebagai Wakil Dekan III FISIP UIN Raden Fatah Palembang.
6. Dr.Eti Yusnita, S.Ag. M.Hi sebagai Ketua Prodi Ilmu Politik FISIP UIN Raden Fatah Palembang
7. Ryllian Chandra Eka Viana, M.A sebagai Sekretaris Prodi Ilmu Politik FISIP UIN Raden Fatah Palembang
8. Pembimbing 1 saya Bapak Taufik Akhyar, M.Si., dan Pembimbing 2 Ibu Tersayang Reni Apriani, S.IP, M.Si

9. Dosen Pembimbing Akademik saya Bapak Andi Candra Jaya,S.Ag.M.Hum
10. Seluruh Dosen Ilmu Politik dan Staf Pegawai Administrasi FISIP UIN Raden Fatah Palembang.

Semoga segala amal kebaikan yang bersangkutan bernilai ibadah disisi Allah SWT, dan semoga ilmu pengetahuan yang menjadi bekal penulis di kemudian hari dapat bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, agama, nusa dan bangsa. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua serta bagi perkembangan hukum di masa yang akan datang. Aamin Ya Rabbal'alamiin.

Palembang, 18 Juli 2021

Lensi Santika

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana efektivitas pengawasan inspektorat terhadap kinerja badan perencanaan dan pembangunan daerah dalam perencanaan infrastruktur jalan di kabupaten Muara Enim. Objek dalam penelitian ini yaitu pengawasan Inspektorat dan Badan perencanaan dan pembangunan daerah Kabupaten Muara Enim. Teori yang digunakan adalah teori efektivitas pengawasan oleh Prof.Dr.Makmur. Dan tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah bagian perencanaan pengawasan dan bidang auditor madya serta auditor muda di kantor Inspektorat dan ketua bidang Infrastruktur dan kewilayahan serta bagian analisis dan data di kantor Badan perencanaan dan pembangunan daerah. Data dikumpulkan dan dianalisa melalui dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang di lakukan inspektorat terhadap kinerja Badan perencanaan dan pembangunan daerah dalam perencanaan infrastruktur jalan di kabupaten Muara Enim belum dapat di katakan efektivitas pengawasan yang di lakukan inspektorat karena terbukti dengan masih banyak nya permasalahan infrastruktur jalan yang belum terselesaikan dan di bukti kan juga dengan hasil reses tahap 1 DPRD kabupaten Muara Enim pada tahun 2020 yang menyatakan permasalahan infrastruktur jalan di Kabupaten Muara Enim ini masih menjadi permasalahan yang dominan di keluhkan oleh masyarakat kabupaten Muara Enim. Untuk itu dalam mengatasi atau meminimalisirkan permasalahan infrastruktur jalan di perlukan peningkatan pengawasan yang di lakukan oleh Inspektorat terhadap kinerja badan perencanaan dan pembangunan daerah, serta kinerja dari pada Bappeda itu harus dituntaskan setiap perencanaan di awal tahun di akhir tahun nya harus terselesaikan.

Kata Kunci : Efektivitas pengawasan Inspektorat, Terhadap Bappeda, Perencanaan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Muara Enim.

ABSTRACT

This study aims to find out how the effectiveness of the inspectorate's supervision on the performance of regional planning and development agencies in road infrastructure planning in Muara Enim district. The object of this research is the supervision of the Inspectorate and the Regional Planning and Development Agency of Muara Enim Regency. The theory used is the theory of effectiveness of supervision by Prof.Dr.Makmur. And the type of research used is descriptive with a qualitative approach. The sources of data in this study are the supervisory planning section and the intermediate auditors and junior auditors at the Inspectorate office and the head of the Infrastructure and regional sector as well as the analysis and data section at the regional planning and development agency office. Data were collected and analyzed through documentation and interviews. The results of this study indicate that the supervision carried out by the inspectorate on the performance of the regional planning and development agency in planning road infrastructure in Muara Enim district cannot yet be said to be the effectiveness of the supervision carried out by the inspectorate because it is proven by the fact that there are still many road infrastructure problems that have not been resolved and have been proven. It is also with the results of the Phase 1 recess of the Muara Enim Regency DPRD in 2020 which stated that the problem of road infrastructure in Muara Enim Regency is still the dominant problem complained of by the people of Muara Enim Regency. For this reason, in overcoming or minimizing road infrastructure problems, it is necessary to increase the supervision carried out by the Inspectorate on the performance of regional planning and development agencies, and the performance of Bappeda must be completed every planning at the beginning of the year at the end of the year must be completed.

Keywords: Effectiveness of Inspectorate supervision, on Bappeda, Road Infrastructure Planning in Muara Enim Regency.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Pernyataan	iv
Motto Dan Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	viii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Kerangka Teori.....	9
G. Metodologi Penelitian.....	11
1. Pendekatan/Metode Penelitian.....	12
2. Data dan Sumber Data.....	13
3. Teknik Pengumpulan Data.....	13
4. Lokasi Penelitian.....	14
5. Teknik Analisis Data.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN YANG RELEVAN	17
A. Konsep Pengawasan.....	17
1. Jenis-Jenis Pengawasan.....	18
2. Pengawasan Internal.....	18
3. Tahap-Tahap Pengawasan Internal.....	19
B. Konsep Kinerja.....	20

1. Indikator Kinerja	20
2. Efektivitas Kinerja.....	20
C. Inspektorat Daerah.....	20
D. Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah.....	21
1. Perencanaan	21
2. Pembangunan	22
3. Perencanaan Pembangunan Daerah	22
4. Faktor penghambat dalam perencanaan	23
5. Pembangunan Infrastruktur Jalan.....	23
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	25
A. Gambaran Umum Kabupaten Muara Enim	25
1. Sejarah Kabupaten Muara Enim.....	25
2. Lokasi Dan Peta Kabupaten Muara Enim	25
3. Keadaan Geografis	28
4. Kependudukan	29
B. Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah.....	31
1. Sejarah Bappeda	31
2. Visi Dan Misi Bappeda	32
3. Program Kerja Bappeda.....	33
4. Tugas Dan Fungsi Bappeda.....	33
5. Data Permasalahan Pembangunan Jalan	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	36
A. Ketentuan Penentuan Waktu	36
B. Ketepatan Perhitungan Biaya	39
C. Ketepatan Dalam Pengukuran	41
D. Ketepatan Dalam Menentukan Pilihan.....	42
E. Ketepatan Berpikir.....	43
F. Ketepatan Dalam Melakukan Perintah	44
G. Ketepatan Dalam Menentukan Tujuan.....	45
H. Ketepatan-Ketepatan Sasaran.....	46
BAB V PENUTUP	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN	55

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pembagian Wilayah Pengawasan Inspektorat	4
Tabel 3.1	Desa Dan Kelurahan Menurut Kecamatan Di Kabupaten.....	27
Tabel 3.2	Ibu Kota Kecamatan Dan Jarak Dari Kota Muara Enim	28
Tabel 3.3	Data Penduduk Menurut Kecamatan.....	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Ukuran Efektivitas Pengawasan	11
Gambar 1.2	Tehnik Analisa Data	14
Gambar 3.1	Peta Wilayah Kabupaten Muara Enim	26
Gambar 4.1	Pengawasan Inspektorat	37
Gambar 4.2	Penyusunan Musrenbang RKPD Tahun 2020	39
Gambar 4.3	DPRD Menyerahkan Laporan Reses Kepada Bupati	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Efektivitas merupakan suatu kondisi yang menunjukkan seberapa jauh suatu target yang sudah diraih oleh manajemen seperti kualitas, kuantitas, dan waktu, yang mana target tersebut telah ditetapkan terlebih dahulu. Efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas adalah daya guna, keaktifan, serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai.

Pengawasan pemerintah daerah disebut pengendalian internal, Pengawasan dilakukan oleh Badan Pengawasan Intern Pemerintah (Banga, 2017:146). Peran utama APIP adalah sebagai konsultan pemecah masalah bagi pemerintah daerah bertugas memeriksa, memantau, mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi pemerintah daerah (OPD). (Matei, Dkk. 2017:90) Pelaksanaan pemerintah daerah yang efektif memerlukan pengendalian internal. Dan pengawasan pemerintah daerah bertujuan untuk memastikan bahwa semua lembaga daerah menjalankan tugasnya secara efektif. (Alam, 2013:16).

Inspektorat merupakan aparat pengawas internal pemerintah Sama kedudukannya dengan fungsi perencanaan dan fungsi eksekutif, dalam rangka mewujudkan rencana pemerintahan. Bagus Laksana Hari dkk, "*Pengaruh kompetensi, independensi, pengalaman kerja, dan kompleksitas tugas terhadap kualitas audit badan pengawasan dan pemeriksaan keuangan daerah serta penghargaan sebagai moderator*", Jurnal Sorot (April 2015), hlm. 1-142 .

Tugas utama Inspektorat daerah adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pengawasan, termasuk kinerja setiap OPD Kabupaten Muara Enim, untuk mencapai visi dan misinya Kabupaten Muara Enim. Adapun rincian tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Muara Enim yang telah di muat dalam Peraturan Bupati No.31 Tahun 2017 yang menyatakan Inspektorat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan

- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
- c. Penyusunan laporan hasil pengawasan
- d. Pengelolaan kesekretariatan yang meliputi, Perencanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun dalam hal ini terkait pada bagian perencanaan pengawasan yang di muat dalam Peraturan Bupati No. 26 Tahun 2020 yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengumpulan, penghimpunan, pengelolaan data dan informasi yang berhubungan dengan bidang perencanaan.
- b. Inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang sub bagian perencanaan dan menyiapkan petunjuk pemecahan masalah
- c. Pengoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan dan fasilitasi
- d. Penyusunan anggaran inspektorat
- e. Penyiapan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan.

Peran dan fungsi Inspektorat Kabupaten atau Kota secara umum di atur dalam pasal 4 peraturan menteri dalam negeri No. 64 tahun 2007. Dalam pasal tersebut melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan Inspektorat mempunyai fungsi sebagai berikut : Perencanaan program pengawasan, Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, Pemeriksaan dan pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Inspektorat melakukan pengawasan di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) melalui dua tahapan yakni pengawasan yang sudah rutin di lakukan setiap di akhir tahun dan pengawasan secara fisik turun ke lapangan untuk melihat kondisi pembangunan yang di lakukan apa sudah sesuai dengan perencanaan yang telah di tetapkan, akan tetapi dalam hal perencanaan infrastruktur jalan di kabupaten Muara Enim ini belum melakukan pengawasan secara langsung turun lapangan terkait perencanaan yang telah di bahas dalam musyawarah rencana pembangunan daerah. Pihak Inspektorat hanya melakukan pengawasan laporan diakhir tahun yang di buat oleh pihak Bappeda selaku yang merancang perencanaan infrastruktur jalan.

Dalam Penyelenggaraan Otonomi daerah perlu adanya pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten Muara Enim, serta dalam upaya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Muara Enim yang wilayah

pengawasannya meliputi seluruh Kabupaten Muara Enim maka perlu mengatur pembagian wilayah pengawasan Inspektorat Kabupaten Muara Enim. (<https://peraturan.bpk.go.id/>, diakses pada tanggal 18 oktober 2020).

Pengawasan pemerintahan daerah sebagaimana ketentuan Pasal 380 Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan :

- a. Bupati atau wali kota sebagai kepala daerah kabupaten atau kota berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah kabupaten atau kota.
- b. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati atau wali kota dibantu oleh Inspektorat kabupaten atau kota.

Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan, pemborosan, kebocoran dan penyelewengan dalam keuangan daerah, maka pemerintah daerah harus melakukan pengawasan.(Adisasmita, 2011:127). Ketentuan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kemudian dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang pedoman tata cara pengawasan atasm penyelenggaraan pemerintah daerah menyatakan “Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Tabel 1.1
Peraturan Bupati No 02 Tahun 2020 Pembagian Wilayah Pengawasan
Inspektorat Kabupaten Muara Enim.

No	Inspektur Pembantu Wilayah	Organisasi Perangkat Daerah Dan BUMD
1.	Inspektur pembantu wilayah I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. 2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 6. Dinas Perhubungan 7. Dinas Perikanan 8. Dinas Ketahanan Pangan 9. PDAM Lematang Enim 10. Kecamatan Muara Belida 11. Kecamatan Kelekar 12. Kecamatan Lembak 13. Kecamatan Gunung Megang 14. Kecamatan Tanjung Agung 15. Kecamatan Semende Darat Laut.
2.	Inspektur pembantu wilayah II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat Daerah 2. Dinas Lingkungan Hidup 3. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 4. Dinas Sosial 5. Dinas Perkebunan 6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 7. Satuan Polisi Pamong Praja 8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 9. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 10. RSUD dr. H.M. Rabain Muara Enim 11. Kecamatan Sungai Rotan 12. Kecamatan Gelumbang 13. Kecamatan Belimbing 14. Kecamatan Belida Darat 15. Kecamatan Muara Enim.
3.	Inspektur pembantu wilayah III	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 4. Badan Pendapatan Daerah 5. Dinas Ketenagakerjaan 6. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 7. Dinas Perdagangan 8. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 9. Perusahaan Daerah Hotel Griya Serasan Sekundang 10. Kecamatan Semende Darat UIu 11. Kecamatan Lubai 12. Kecamatan Panang Enim 13. Kecamatan Benakat 14. Kecamatan Rambang 15. Kecamatan Rambang Niru.

4.	Inspektur pembantu wilayah IV	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 4. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 5. Dinas Kesehatan 6. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan 7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 8. Dinas Kepemudaan dan Olahraga 9. Dinas Komunikasi dan Informatika 10. Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim 11. Kecamatan Semende Darat Tengah 12. Kecamatan Lubai Ulu 13. Kecamatan Empat Petulai Dangku 14. Kecamatan Ujan Mas 15. Kecamatan Lawang Kidul.
----	-------------------------------	--

Sumber: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/147291/perbup-kab-Muara-Enim-no-2-tahun-2020>.

Berdasarkan data perbup no 2 tahun 2020 di atas yang menjadi permasalahan dan perlu pengawasan Inspektorat yaitu di Inspektur pembantu wilayah bagian 4 pada badan perencanaan dan pembangunan daerah seperti halnya dalam perencanaan Infrastruktur jalan dalam hal ini Bappeda selaku yang menyusun dan melakukan perencanaan, dan berdasarkan hasil reses tahap 1 yang di gelar oleh DPRD Muara Enim yang masih menjadi permasalahan yang dominan dan banyak di keluhkan masyarakat yaitu masalah perbaikan dan pembangunan jalan di daerah Muara Enim maka perlu melihat perencanaan yang telah di tetapkan dan di bahas di dalam rapat musyawarah rencana pembangunan daerah yang di tetapkan oleh pihak Bappeda setiap tahun nya.

Perencanaan adalah upaya untuk memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan cara menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang di perlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah suatu rangkaian yang berhubungan dengan proses dan hasil atau keputusan yang di buat sebagai pedoman yang menjadi patokan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan. (Riyadi Deddy Supriyadi Bratakusumah : 2004).

Perencanaan pembangunan infrastruktur jalan yang belum merata serta belum dapat meminimalisirkan permasalahan infrastruktur jalan yang terjadi akibat dari tahun ke tahun terjadi ketidaksesuaian antara perencanaan yang dibuat di awal tahun di akhir tahun laporan nya

tidak semua perencanaan pembangunan infrastruktur jalan yang sudah di rencanakan itu terlaksana semua di akhir tahun. Permasalahan perencanaan yang kurang tepat dan pembangunan yang tidak sesuai serta pengawasan yang kurang efektif yang menimbulkan banyak permasalahan infrastruktur jalan di kabupaten Muara Enim.

Permasalahan pembangunan jalan di kabupaten Muara Enim sudah banyak terjadi salah satu nya KPK menangkap tiga saksi terkait kasus suap pembangunan jalan Muara Enim seperti yang di laporkan reporter Irwanto pada 6 agustus 2020 di dalam kasus OTT proyek pembangunan jalan itu melibatkan mantan Bupati Muara Enim Ahmad Yani serta Elfin Muchtar dan penyuap Robi Okta Fahlevi yang merupakan pemilik PT. Enra Sari selaku pemenang lelang proyek, Kasus ini terjadi saat pengerjaan pembangunan jalan pada tahun 2019.

Kasus penyuaipan merupakan salah satu yang menyebabkan pembangunan infrastruktur jalan di kabupaten Muara Enim ini mengalami keterhambatan bahkan membuat ketidaktuntasan perencanaan yang telah di tetapkan sebelumnya, dan adapun faktor penyebab lainnya berdasarkan hasil wawancara dengan bagian kbid infrastruktur di kantor Bappeda mereka mengungkapkan kurangnya dana anggaran karena di alihkan untuk penanganan pandemic covid-19 di kabupaten Muara Enim sehingga infrastruktur jalan di tahun berjalan dapat mempengaruhi pembangunan ditahun berikutnya. (<https://m.merdeka.com/peristiwa/kpk-kembali-periksa-3-saksi-terkait-ott-suap-pembangunan-jalan-Muara-Enim.html>).

Berdasarkan hasil dari Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim melakukan kegiatan Reses Tahap I Tahun 2020 dengan mengumpulkan aspirasi masyarakat di daerah Kabupaten Muara Enim sesuai dengan hasil reses DPRD masing-masing. Hasilnya, pembangunan Infrastruktur jalan masih menjadi permasalahan dominan yang dikeluhkan masyarakat. Hal itu tertuang dalam sidang paripurna agenda laporan hasil pelaksanaan reses tahap I tahun 2020 oleh setiap daerah pemilihan (dapil) yang digelar di gedung DPRD Muara Enim. (<https://sumeks.co/jalan-rusak-perusahaan-minim-serap-tenaga-lokal>, diakses pada tanggal 2 november 2020).

Pembangunan Infrastruktur jalan di daerah Kabupaten Muara Enim yang belum merata serta masih terjadi perbaikan jalan seperti yang disampaikan oleh masing-masing dapil dari tiap wilayah Anggota DPRD Muara Enim Dapil III, Rani Kodim dalam

penyampaiannya mengutarakan pelaksanaan reses yang dilaksanakan dewan Dapil III pada 17-21 Februari di Kecamatan Gelumbang, Lembak, Kelekar, Belida Darat, Sungai Rotan dan Muara Belida. Adapun usulan program hasil reses pertama Dapil tiga diantaranya pelebaran dan perawatan jalan sepanjang 5 km di Desa Karang Jaya, serta 2 km di Desa Tanjung Buntut berdasarkan hasil wawancara dengan bagian analisis dan data di kantor Bappeda menurutnya hasil reses itu sudah sesuai dengan permendagri No.86 tahun 2017 yang mengatur tahapan-tahapan perencanaan dan pokok-pokok pikiran dewan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Pengawasan sangatlah penting karena tanpa adanya pengawasan Perencanaan tidak akan berjalan dengan baik. Pengawasan juga dapat mencegah suatu tindakan penyimpangan dalam melaksanakan suatu pekerjaan yang telah direncanakan akan tetapi yang telah direncanakan sering kali tidak sesuai dengan tujuan awalnya itulah mengapa banyak terjadi permasalahan perencanaan jalan yang setiap tahunnya banyak belum teralisasiikan di Kabupaten Muara Enim.

Berdasarkan data perbup No 2 tahun 2020 yang mengatur tentang pembagian wilayah kerja Inspektorat dan juga berdasarkan hasil reses DPRD tahap 1 di tahun 2020 menyatakan permasalahan infrastruktur jalan masih menjadi permasalahan yang dominan dikeluhkan masyarakat maka perlu melihat efektivitas pengawasan inspektorat terhadap perencanaan yang telah di tetapkan di daerah Kabupaten Muara Enim. Maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang ***EFEKTIVITAS PENGAWASAN INSPEKTORAT TERHADAP KINERJA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR JALAN DI KABUPATEN MUARA ENIM.***

B. Rumusan Masalah

Bagaimana efektivitas pengawasan Inspektorat terhadap kinerja Badan Perencanaan dan Pembangunan daerah dalam Perencanaan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Muara Enim.

C. Tujuan Penelitian

Mengetahui efektivitas pengawasan Inspektorat terhadap kinerja BAPPEDA dalam perencanaan Infrastruktur jalan di seluruh kabupaten Muara Enim.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini di harapkan berguna bagi pembaca khususnya bagi pemerintah dan masyarakat, serta diharapkan menambah wawasan pengetahuan mengenai pemerintah daerah karena penelitian ini menjelaskan bagaimana pengawasan Inspektorat terhadap badan perencanaan pembangunan daerah dalam perencanaan infrastruktur jalan di kabupaten Muara Enim yang seharusnya di tingkatkan lagi pengawasannya. Selain itu penelitian ini diharapkan juga dapat membantu proses pembelajaran secara akademis dalam lingkungan perguruan tinggi terutama khususnya di bidang kajian ilmu politik.

2. Secara praktis

diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah agar selalu meningkatkan pengawasannya di seluruh organisasi perangkat daerah terutama badan perencanaan pembangunan daerah yang berperan dalam melakukan perencanaan Infrastruktur jalan. Manfaat bagi masyarakat agar lebih mengetahui peran dan fungsi perangkat daerah terutama fungsi pengawasan dan perencanaan dalam mengatasi masalah Infrastruktur jalan di kabupaten Muara Enim.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka akan menguraikan perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan penulis lakukan. Setelah menelusuri penelitian-penelitian sebelumnya, penulis tidak menemukan penelitian dengan pembahasan yang sama dengan penelitian yang akan penulis lakukan. termasuk berikut ini.

Penelitian ini dilakukan oleh Nina Trisnawati dkk, dengan judul *Analisis efektivitas pelaksanaan fungsi inspektorat daerah di kabupaten konawe*. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018. Penelitian ini berfokus pada analisis efektivitas pelaksanaan fungsi Inspektorat daerah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan strategi survey. Metode analisis data yang digunakan adalah statistic deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja fungsi pengawasan daerah sudah baik, namun belum mencapai tingkat yang baik, yang berarti instansi tersebut belum sepenuhnya menerapkan standar pengawasan yang efektif. Jika di bandingkan penelitian yang akan peneliti lakukan yang menjadi pembeda yaitu saudari Nina Trisnawati lebih memfokuskan pada analisis efektivitas fungsi Inspektorat, sedangkan peneliti lebih memfokuskan pada efektivitas pengawasan Inspektorat terhadap kinerja BAPPEDA dalam perencanaan Infrastruktur Jalan di seluruh daerah Muara Enim.

Penelitian ini dilakukan oleh Epafras Tuidanu dkk, *judul Pengawasan inspektorat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Ternate (Studi di Inspektorat Kota Ternate)*. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2017 (Universitas Sam Ratulangi). Penelitian ini berfokus pada menjelaskan fungsi pengawasan pada Inspektorat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kota Ternate dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada generalisasi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengawasan Inspektorat dalam penyelenggaraan pemerintah kota Ternate belum berjalan sesuai dengan yang di harapkan.

Penelitian ini dilakukan oleh Wandu Harmawan dkk dengan judul, Analisis pelaksanaan fungsi Inspektorat Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan, penelitian ini dilakukan pada tahun 2012 (Universitas Hasanuddin) penelitian ini berfokus untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan fungsi Inspektorat Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, melalui wawancara secara langsung dilokasi penelitian dengan narasumber yang kompeten dan relevan. Metode yang digunakan adalah deskriptif berbagai hasil wawancara dan kemudian melakukan analisis terhadap data tersebut.

Penelitian ini memfokuskan pada analisis pelaksanaan fungsi Inspektorat Di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan sedangkan penulis meneliti lebih memfokuskan pada efektivitas pengawasan Inspektorat terhadap kinerja BAPPEDA dalam perencanaan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Muara Enim.

F. **Kerangka Teori**

Penelitian ini berlatar belakang dengan kata efektivitas pengawasan Inspektorat terhadap kinerja Bappeda dalam perencanaan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Muara Enim. Efektivitas pengendalian intern memegang peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada saat yang sama, pengawasan pemerintah daerah bertujuan untuk memastikan bahwa

semua lembaga yang menjalankan fungsi publik melakukan kegiatan dan tugasnya secara efektif dan efisien. (Alam, 2013:16).

Teori adalah serangkaian prinsip pengorganisasian yang membantu peneliti menggambarkan dan memprediksi tentang apa yang akan ia teliti. Hani Handoko mendefinisikan efektivitas sebagai hubungan antara keluaran dan tujuan, yang berarti bahwa semakin besar kontribusi untuk mencapai tujuan, semakin efektif organisasi, rencana, atau kegiatan.

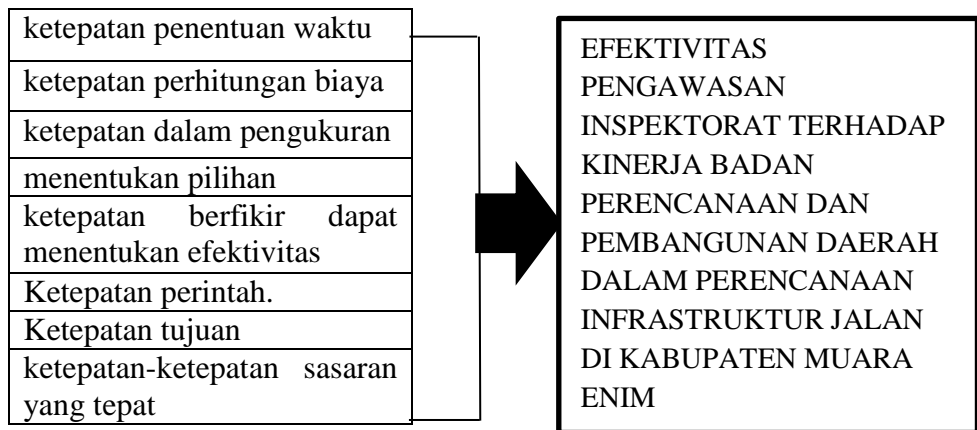
Efektivitas adalah hubungan antara suatu pusat pertanggung jawaban dengan tujuan yang harus dicapai. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa efektivitas didasarkan pada sejauh mana kesejahteraan masyarakat meningkat dengan adanya suatu perencanaan tertentu, karena kesejahteraan masyarakat merupakan proses perencanaan yang akan di rancang.

Pengawasan adalah segala upaya dan tindakan untuk mengetahui sejauh mana berbagai tugas dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan tujuan yang ingin dicapai.(Makmur:2011). Menurut ukuran efektivitas Makmur dalam bukunya “Efektivitas Kebijakan Pengawasan Kelembagaan”, terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

1. Ketepatan waktu dapat menentukan keberhasilan kegiatan yang dilakukan dalam organisasi. Waktu dapat sangat menyebabkan kegagalan untuk mencapai tujuan. Penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektifitas pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya
2. Kedua, ketepatan perhitungan biaya merupakan suatu kegiatan dalam individu dan organisasi, dan ketepatan dalam penggunaan biaya kegiatan, yaitu tidak akan ada kekurangan sebelum kegiatan tersebut selesai. Ketepatan penetapan biaya merupakan bagian dari efektifitas pencapaian tujuan.
3. Ketiga, akurasi pengukuran adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk berhasil mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Ketepatan pengukuran yang digunakan untuk melakukan aktivitas atau tugas yang diberikan kepada individu adalah ukuran efektivitas.
4. Keempat, Ketepatan seleksi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan melalui ketepatan seleksi, karena dalam seleksi diperlukan proses yang sangat penting untuk mencapai efek.
5. Kelima, ketepatan berpikir menentukan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
6. Keenam, ketepatan pelaksanaan suatu perintah adalah kemampuan suatu organisasi atau individu untuk mengeluarkan perintah yang jelas dan mudah dipahami.

7. Ketujuh, ketepatan menentukan tujuan adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi atau individu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tujuan yang ditetapkan dengan benar akan mendukung efektivitas pelaksanaan kegiatan tersebut.
8. Kedelapan, ketepatan-ketepatan sasaran yang tepat dan baik dapat menentukan keberhasilan aktifitas individu atau organisasi dalam mencapai tujuannya.

Dikatakan efektivitas jika jelas tujuan yang hendak di capai, strategi nya jelas dalam mencapai tujuan, perencanaan yang telah di musyawarahkan bersama di dalam musrenbag kabupaten, serta pelaksanaan kerja yang di lakukan oleh dinas terkait. Maka dapat mewujudkan pengawasan yang tepat ke depannya. Berikut kriteria efektivitas pengawasan menurut Makmur : 2011



Gambar 1.1 Ukuran Efektivitas Pengawasan

Sumber : Makmur,(2011) Efektifitas kebijakan kelembagaan pengawasan, Bandung : PT. Rafika Aditama.

Oleh karena itu, rumusan teori ini adalah penelitian yang berjudul ***“Efektivitas pengawasan lembaga inspeksi terhadap kinerja badan perencanaan dan pembangunan daerah dalam perencanaan infrastruktur jalan Kabupaten Muara Enim”***. Ini akan menggunakan teori efektivitas pengawasan oleh Makmur (2011).

G. Metode Penelitian

Metode ini merupakan asumsi dasar tentang hal-hal yang dijadikan dasar berpikir dan bertindak dalam penelitian (Harrison, 2016: 15). Dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu

cara atau prosedur untuk memperoleh solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Lapangan dan menggunakan pendekatan kualitatif dan tipe penelitian deskriptif. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengumpulkan data lapangan yang menggambarkan masalah yang telah terjadi atau peristiwa dan sedang terjadi. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang penelitiannya berperan sebagai pewawancara atau pengamat empatik untuk mengumpulkan data tentang permasalahan yang ditelitinya.

Penentuan informan dilakukan dengan snowball sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data yang diperoleh dari kaidah Infrastruktur dan kewilayahan dan perencanaan serta auditor inspektorat kabupaten Muara Enim. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka penelitian menggunakan studi kepustakaan yaitu berupa buku, dokumen, arsip sebagai sumber data. (Sugiyono, 2010: 85). Untuk memperoleh data-data yang ada hubungannya dengan penelitian, maka peneliti menggunakan beberapa langkah-langkah berikut:

1. Pendekatan penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif. Menurut Jary dan Jary (1991), penelitian kualitatif adalah penelitian yang penelitiannya mencurahkan kemampuan sebagai pewawancara atau pengamat yang empatik untuk mengumpulkan data tentang permasalahan yang diteliti. (S.Aminah. Roikan: 2019).

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe Penelitian deskriptif, yang kemudian peneliti interpretasikan dengan menggunakan metode penulisan, pengkodean, dan analisis tren dan tema yang ketat dan sistematis.

Peneliti menggambarkan permasalahan yang terjadi melalui Penelitian lapangan (Field Research) sesuai fakta, teori dan konsep berdasarkan data yang didapat, berkaitan dengan fenomena yang penulis teliti dalam penelitian ini, tentang Efektivitas pengawasan inspektorat terhadap kinerja badan perencanaan dan pembangunan daerah dalam perencanaan infrastruktur jalan di kabupaten Muara Enim.

2. Data dan jenis

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui wawancara secara langsung di lapangan dengan informan sebagai berikut:

a. kaidah Infrastruktur dan kewilayahan yakni ibu Yulia

- b. bagian analisis dan data yakni bapak Andrian di kantor Bappeda
- c. Serta bagian perencanaan pengawasan yakni bapak Riza
- d. Auditor pengawasan di kantor inspektorat ibu Yeti dan Pak Agus.

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang digunakan untuk memperkuat, melengkapi, atau mendukung data primer. Data sekunder penelitian ini berupa perbup no.02 tahun 2020 dan juga hasil reses DPRD tahap 1 tahun 2020, dan juga melalui sumber seperti buku, catatan, Jurnal, Data-data yang berkaitan dengan judul diatas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi mengenai efektivitas pengawasan inspektorat terhadap kinerja Bappeda dalam perencanaan infrastruktur jalan di kabupaten Muara Enim, Proses dalam wawancara adalah tanya jawab secara lisan tentang bagaimana efektivitas pengawasan inspektorat dalam perencanaan infrastruktur jalan. Dan berikut informan dari Inspektorat Muara Enim yaitu wawancara dengan bagian perencanaan pengawasan inspektorat, dengan bagian auditor madia dan auditor muda. Dan adapun informan dari Badan perencanaan dan pembangunan daerah di Kabupaten Muara Enim yaitu wawancara dengan bagian Kabid Infrastruktur dan kewilayahan, analisis dan data di kantor Bappeda, (Emzir, 2010:50).

b. Dokumentasi

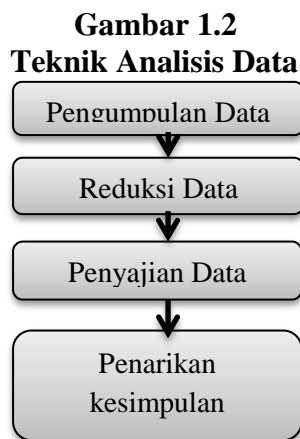
Dokumentasi merupakan sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian.(Nanang, Martono:2016). Dokumen yang digunakan peneliti disini adalah berupa Dokumentasi berupa foto pada saat wawancara, catatan wawancara, serta rekaman hasil pada saat wawancara berlangsung.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Adapun lokasi dari penelitian ini yaitu di Kantor Bappeda sedangkan fokus dari penelitian ini adalah peran pengawasan Inspektorat terhadap Bappeda dalam melakukan perencanaan infrastruktur jalan di Kabupaten Muara Enim.

5. Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, antara lain menggunakan empat tahapan yaitu :



Sumber : Diolah Peneliti

a. Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini di peroleh melalui wawancara langsung yakni secara lisan dengan bagian Kabid infrastruktur dan kewilayahan di Bappeda dan Inspektorat Muara Enim serta di tambah dengan data berupa dokumentasi.

b. Reduksi Data

Menurut Miles and Huberman Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. (Sugiyono:2018) Pada tahap ini peneliti menyaring informasi yang di dapat melalui informan, sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

c. Penyajian Data

Penyajian data menurut Miles and Huberman yaitu data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan Menurut Miles and Huberman yaitu kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah di uraikan maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang singkat.

H. Sistematika Penulisan Laporan

Dalam penelitian ini, peneliti membagi sistematika penulisan ke dalam 5 bab yaitu:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan tentang pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian yang didalamnya terdapat tipe penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, analisis data dan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Pustaka Yang Relevan

pada Bab kedua ini membahas tentang kajian dari berbagai pihak secara teoritis tentang fokus masalah yang diangkat. Yang berisikan pengertian teori, pengertian efektivitas serta faktor-faktor yang mempengaruhi dalam mencapai suatu efektivitas kerja itu dapat di terapkan.

BAB III : Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada Bab ketiga ini berisi gambaran tentang umum dari lokasi penelitian secara rinci mengenai objek yang akan di teliti dalam hal ini lokasi penelitian dalam penelitian ini yaitu Inspektorat dan Bappeda Kabupaten Muara Enim.

BAB IV : Hasil Dan Pembahasan

Pada Bab keempat ini dibahas mengenai proses analisis dan pemaknaan dari data serta informasi yang sudah diperoleh. Selanjutnya, data-data yang telah didapat akan peneliti analisa dengan menggunakan alat analisis berupa Teori Sehingga peneliti dapat menjawab perumusan masalah yang terdapat pada bab pertama.

BAB V : Penutup

Pada Bab kelima ini berisikan penutup yang terdiri dari kesimpulan dari hasil yang telah diteliti serta saran yang akan diberikan mengenai rumusan masalah atau kendala yang di dapatkan dalam hasil penelitian serta rangkuman dari keseluruhan isi dari penelitian yang membahas tentang Efektivitas pengawasan Inspektorat terhadap kinerja Bappeda dalam perencanaan infrastruktur jalan di Kabupaten Muara Enim.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN YANG RELEVAN

A. Konsep Pengawasan

Pengawasan adalah segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari tujuan serta rencana yang sudah di programkan. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Sumarsono, 2010).

Pengawasan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata “awas”, yang berarti pengawasan merupakan kegiatan mengawasi kinerja di setiap organisasi pemerintah daerah baik secara regular maupun langsung ke lapangan. Serta dapat juga di definisikan bahwa pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki”.(Sarwoto, 2006).

Tujuan Pengawasan dilakukan agar suatu proses dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan organisasi bagian manajemen dapat tercapai sesuai program yang sudah direncanakan, dalam Proses ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan jadi dapat disimpulkan terlaksananya pengawasan yang efektif jika sudah memenuhi semua perencanaan yang telah di rancang dalam RPJMD Kabupaten Muara Enim (Yahya,2016: 133).

Pengawasan tidak lain adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai Secara umum pengawasan adalah segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari tujuan serta rencana yang sudah di programkan. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Sumarsono, 2010).

Pengawasan tidak lain adalah untuk memastikan derajat pelaksanaan tugas yang dilakukan sesuai dengan peraturan dan tujuan yang ingin dicapai (Makmur: 2011). Maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan suatu tindakan kinerja dalam mengawasi

suatu kegiatan yang sudah di programkan. Lembaga pengawasan jiwanya adalah manusia, oleh sebab itu keberhasilan dan kegagalan suatu lembaga pengawasan sangat bergantung kepada manusianya, jika manusia berperilaku baik maka pengawasan juga akan menjadi baik, tetapi demikian juga sebaliknya jika manusia nya berperilaku pembohong atau tidak jujur terhadap apa yang ia kerjakan maka pengawsan akan menciptakan masalah terhadap kelembagaan yang bersangkutan.

1. Jenis Pengawasan

Pengawasan dapat dibagi menjadi beberapa jenis dan ditinjau dari beberapa aspek, antara lain:

- a. Pengawasan dilihat dari hubungan antara subyek yang mengawasi dengan obyek yang diawasi.
- b. Pengawasan dilihat dari sudut pandang otoritatif dan berdasarkan kekuasaan.
- c. Pengawasan ditinjau berdasarkan waktu pelaksanaan pekerjaan. Pengawasan dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal.

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh pengawas. Badan pengawas merupakan bagian dari organisasi yang diawasi dan diberi tugas dan fungsi pengawasan organisasi. Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga atau kelompok pengawas selain lembaga yang diawasi. (Handayingrat 2012: 144).

2. Pengawasan Internal

Peraturan pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah menyebutkan bahwa pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pemimpin dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

Menurut Siagian dikutip (Kadarisman, 2013:172) Pengawasan merupakan kegiatan yang di lakukan langsung di lapangan atau pun memeriksa laporan pertahun di setiap organisasi perangkat daerah. Melakukan pengamatan pada semua pekerjaan yang dilakukan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Halim dan Muhammad (2018:370), pengawasan adalah suatu tindakan mengamati pekerjaan yang

seharusnya di lakukan dengan pekerjaan yang telah di lakukan oleh organisasi perangkat daerah.

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh organisasi atau unit pengawasan yang dibentuk di dalam organisasi atas nama pimpinan organisasi. Hasil pemantauan ini dapat digunakan untuk mengarahkan nilai kebijakan. Untuk melakukan ini, kepemimpinan perlu meninjau kebijakan atau keputusan yang diterbitkan. Di sisi lain, pemimpin dapat mengambil tindakan korektif atas pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pengendalian internal bawahannya. (Simbolon, 2013: 61).

Berdasarkan menurut pendapat yang telah di simpulkan di atas maka peneliti menyimpulkan pengawasan internal kegiatan yaitu dengan melakukan pengawasan terhadap program-program yang telah di rencanakan pemerintah mulai dari program yang dilaksanakan hingga proses pelaksanaan dan melakukan pengecekan ke lapangan apakah pekerjaan yang telah dilakukan itu sudah sesuai dengan yang di targetkan atau belum itulah yang disebut pengawasan.

3. Tahap-tahap proses pengawasan internal

Pengawasan merupakan langkah awal orang harus menentukan standar pada pengawasan dan merupakan pusat-pusat strategis, Oleh karena itu orang tidak dapat mengecek segalanya. Maka harus dibedakan hal apa yang dapat diawasi, dan hal apa yang tidak dapat diawasi. Reksohadiprodjo (2002: 63) Berikut ini tahapan-tahapan dalam proses pengawasan internal :

- a. Tahap 1 : Pengaturan standar Eksekusi mengacu pada unit pengukuran, yang dapat digunakan sebagai "Pedoman" hasil evaluasi, tujuan, indikator dan indikator kinerja, serta dapat digunakan sebagai standar pengawasan.
- b. Tahap 2 : Tentukan ukuran dalam implementasi aktivitas tanpa berbagai metode untuk mengukur kinerja aktivitas aktual, penetapan standar tidak ada gunanya. Oleh karena itu, pemantauan tahap kedua adalah menentukan ukuran yang sesuai untuk pelaksanaan kegiatan.
- c. Tahap 3 : Pengukuran implementasi dalam kegiatan frekuensi sistem pengukuran dan pemantauan dapat ditentukan dengan melakukan pengukuran yang dilakukan sebagai suatu proses dan berulang-ulang.
- d. Tahap 4 : Melakukan perbandingan dengan standar dan analisis terhadap kasus penyimpangan.

B. Konsep kinerja

Dasarnya kinerja dapat dilihat dari dua aspek, yaitu kinerja pegawai (individu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai merupakan hasil kerja individu dalam organisasi. Kinerja organisasi adalah jumlah pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh organisasi. Kinerja pegawai dan kinerja organisasi mempunyai hubungan yang sangat erat dalam mencapai tujuan organisasi, tidak terlepas dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi, sumber daya tersebut digerakkan atau dioperasikan oleh pegawai yang berperan aktif dalam mencapai tujuan organisasi. (Harbani Pasolong, 2013).

1. Indikator Kinerja

Kinerja Merupakan bagian penting dari perencanaan strategis. Tanpa indikator kinerja yang jelas, rencana strategis tentu saja tidak dapat dilaksanakan dengan benar, karena tidak ada pedoman yang jelas atas hasil yang dicapai dalam setiap kegiatan, tetapi dapat dilihat dari kinerja setiap organisasi perangkat daerah. (Rahardjo Adsasmita, 2011).

2. Efektivitas Kinerja

Pengukuran kinerja terutama digunakan untuk mengevaluasi kegiatan, rencana, Kebijakan dan tujuan atau sasaran dirumuskan untuk mencapai visi-misi pemerintah. Dalam melakukan pengukuran kinerja, merupakan alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan akuntabilitas. Dalam melakukan pengukuran kinerja, merupakan alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan akuntabilitas. Dan pengukuran kinerja memiliki makna ganda, yaitu pengukuran kinerja itu sendiri dan evaluasi pekerjaan (Rahardjo Adsasmita, 2011).

C. Inspektorat Daerah

Pada Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang disebut sebagai lembaga pengawasan internal pemerintah atau biro pengawasan daerah, adalah lembaga pemerintah strategis yang bertugas melakukan pengawasan. (<https://www.klikharso.com/2016/04/gambaran-tentang-Apip.html> diakses tanggal 2 desember 2020).

Dalam hal ini pembangunan infrastruktur jalan pengawasan inspektorat daerah harus melaksanakan perannya selaku pengawas intern terhadap program pembangunan jalan yang sudah di rencanakan serta meningkatkan pengawasan terhadap BAPPEDA dalam melakukan perencanaan infrastruktur jalan di seluruh wilayah Kabupaten Muara Enim.

Tujuan Pengawasan Oleh Inspektorat Daerah Aparatur pengawasan internal pemerintah (APIP) merupakan proses pengawasan keseluruhan dari kegiatan audit, review, pemantauan, Serta melakukan evaluasi pada suatu pekerjaan. Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi suatu organisasi yang bertujuan untuk dapat menjadi pedoman dalam melakukan pengawasan terhadap suatu pekerjaan dan telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan suatu pemerintahan yang baik. Berikut tujuan dari pelaksanaan audit Inspektorat yaitu:

- a. Menetapkan prinsip-prinsip dasar.
- b. Menyediakan kerangka kerja.
- c. Menetapkan dasar pengukuran kinerja audit.
- d. Mempercepat perbaikan dalam kegiatan operasi.
- e. Mendorong auditor untuk mencapai tujuan audit

D. Badan perencanaan dan pembangunan daerah

Bappeda adalah lembaga teknis daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah serta di pimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Bupati atau Walikota. Dapat disimpulkan juga sebagai suatu organisasi perangkat daerah. Berikut fungsi Badan perencanaan pembangunan daerah :

- a. Sebagai persiapan pelaksanaan penelitian di bidang pemerintahan dan pembangunan sosial serta model dasar pembangunan daerah dalam rangka pembangunan secara menyeluruh.
- b. Badan Perencanaan Proyek Tahunan.
- c. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- d. Monitoring dan evaluasi rencana pembangunan daerah.

1. Perencanaan

Menurut Terry, Perencanaan merupakan menghubungkan fakta dan melihat permasalahan dari tahun sebelumnya serta melihat keadaan di masa depan untuk melakukan suatu program kerja yang akan di tetapkan dalam jangka waktu tertentu. Dengan tujuan untuk mencapai hasil sesuai dengan yang telah di rencanakan.

a. Fungsi Perencanaan

Fungsi perencanaan adalah penyiapan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan, adapun fungsi di buatnya perencanaan sebelum melakukan suatu pekerjaan yaitu tujuannya tak lain agar mencapai suatu kegiatan kinerja yang efektif dan efisien. (Handoko. 2003:23)

1. Sebagai penetapan tujuan organisasi.
2. Perencanaan yang strategis dalam penentuan kebijakan serta

anggaran untuk suatu kegiatan yang akan di lakukan.

Adapun Langkah-langkah khusus dalam menentukan rencana yang baik adalah sebagai berikut:

1. Melihat masalahnya.
2. menyesuaikan kondisi di lapangan.
3. Tentukan target untuk di capai.
4. Buatlah proposal yang sudah disiapkan.
5. Tentukan komponen.
6. Naskah rencana evaluasi. (Prajudi dan Syafie 2007:50)

Keberhasilan suatu pekerjaan itu dapat di lihat dari perencanaan yang telah di tetapkan terlebih dahulu sebelum pekerjaan itu di lakukan karena perencanaan yang tepat akan menghasilkan tujuan yang baik dalam suatu pekerjaan yang akan di lakukan. Dalam perencanaan waktu mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan suatu pekerjaan.

2. Pembangunan

Pembangunan merupakan upaya untuk mencapai perubahan yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Dengan demikian, peningkatan taraf kehidupan dapat pula di artikan sebagai tujuan yang hendak dicapai melalui pengembangan pembangunan di masyarakat. Soetomo (2009:166).

Maka dapat disimpulkan kesejahteraan masyarakat suatu daerah itu juga dapat di pengaruhi oleh ada tidak nya pembangunan di suatu wilayah yang dapat mendorong kemajuan ekonomi di masyarakat. Perencanaan pembangunan adalah bentuk usaha dalam mengelolah sumber daya yang ada dalam suatu daerah yaitu dengan melalui pembangunan agar dapat mengembangkan potensi yang ada dalam suatu daerah itu sendiri serata mencapai tujuan nasional (Listyianingsih, 2014: 92).

3. Perencanaan Pembangunan Daerah

Tahap awal proses pembangunan berfungsi sebagai pedoman dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Adapun perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat dari unsur-unsur yang menyusunnya.

(Randy R. Whiratnolo. Riant Nugroho. 2006: 41). Rencana pembangunan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kebijakan dasar perencanaan pembangunan
- b. Perkiraan sumber-sumber pembangunan, terutama pembiayaan.
- c. Adanya kebijakan yang konsisten dan terkoordinasi seperti kebijakan fisik, mata uang, anggaran, harga, sektoral dan pembangunan daerah.

- d. Adanya organisasi pengelola pembangunan yang mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. (Asrofi. 2005:7)

Dalam perencanaan pembangunan daerah harus dilakukan pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaannya baik secara langsung ke lapangan maupun secara laporan pertahunnya agar tercapai tujuan yang telah direncanakan. Adapun Bentuk pemantauan yaitu melakukan pengawasan, pengendalian terhadap pekerjaan yang sedang berlangsung, Sedangkan evaluasi yaitu mengoreksi hasil pekerjaan yang telah dilakukan.

Monitoring adalah proses mengamati semua kegiatan Organisasi perangkat daerah dengan tujuan untuk mengawasi semua kegiatan telah dilaksanakan sesuai perencanaan. Sedangkan evaluasi yaitu mengukur dan membandingkan hasil yang seharusnya dicapai, serta mengawasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. (Siagian Riadi, 2005:263).

- a. Pahami sejauh mana rencana dijalankan berdasarkan konten yang ditentukan.
- b. Memahami apakah setiap unit melaksanakan kegiatan sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing.
- c. Memahami apakah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan perintah dinas terkait sesuai perencanaan.
- d. Melakukan pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

4. Faktor penghambat dalam perencanaan

Terdapat tiga hal yang dapat menyebabkan masalah dalam proses perencanaan dalam melakukan pembangunan infrastruktur jalan yaitu:

- a. Kendala yang disebabkan oleh adanya kepentingan para penguasa dalam perencanaan tersebut.
- b. Keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat, menjadi dasar dalam membuat perencanaan yang baik.
- c. Budaya dan Kultur masyarakat dapat mempengaruhi hasil dari pada perencanaan yang telah dibuat. Karena berhasilnya suatu pekerjaan Infrastruktur jalan itu harus mendapat partisipasi juga dari masyarakat di suatu wilayah tertentu. (Riyadi dan Deddy 2005 : 349).

5. Pembangunan Infrastruktur Jalan

Pembangunan merupakan upaya untuk mencapai perubahan yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Dengan demikian, peningkatan taraf kehidupan dapat pula diartikan sebagai tujuan yang hendak dicapai melalui

pengembangan di masyarakat. Soetomo (2009:166).

Infrastruktur diartikan sebagai fasilitas yang dibutuhkan masyarakat umum untuk mendukung berbagai aktivitas masyarakat terutama infrastruktur jalan yang menjadi penghubung kegiatan perekonomian rakyat baik antar kota maupun antar desa. Dan mendukung keberlangsungan dari pada aktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Pengertian Infrastruktur adalah suatu sistem yang mendukung sistem sosial dan ekonomi, dan sekaligus berperan sebagai penghubung sistem lingkungan, yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan (Robert J. Kodoatie 2005).

Perumusan kebijakan perencanaan secara menyeluruh dan penyusunan peraturan perundang-undangan, serta kegiatan penyusunan pedoman teknis dan standar, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, dan pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan (Cakra, 2009).

Isu infrastruktur jalan menjadi agenda penting bagi pemerintah daerah Kabupaten Muara Enim untuk melakukan perubahan agar lebih baik lagi di tahun berikutnya. Infrastruktur merupakan penentu keberlangsungan kegiatan pembangunan, termasuk pencapaian tujuan pembangunan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Akibat pembangunan yang tidak merata, pengawasan terhadap kondisi jalan yang dibangun di wilayah Kabupaten Muara Enim tidak memaksimalkan hasil dan tidak meminimalkan perencanaan maka itu sesuai dengan hasil reses tahap 1 DPRD di tahun 2020 .

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Muara Enim

1. Sejarah Kabupaten Muara Enim

Asal mula terbentuknya kabupaten Muara Enim yaitu berasal dari nama kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah atau disingkat daerah (LIOT), Kabupaten Muara Enim berawal dari kisah sejarah yang dilakukan oleh panitia sembilan atas realisasi daripada surat penetapan Bupati Daerah Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah pada tanggal 26 nopember 1946, yang merupakan hasil karya panitia Sembilan tersebut menyimpulkan ke dalam satu dokumen yang terdiri atas 10 Bab, yang berjudul Naskah Hari Jadi Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah dan telah ditetapkan sebagai surat keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah tanggal 14 Juni 1972 No. 47/Deshuk/1972.(www.hargasumsel.com/profildaerah/detail/muara-enim).

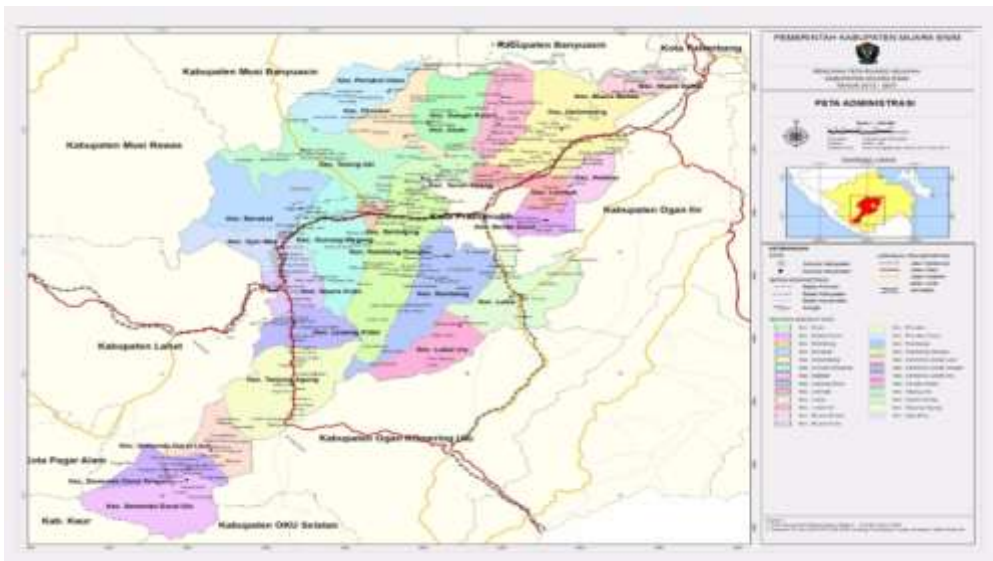
Berdasarkan pengalihan sejarah bahwa Kabupaten Muara Enim dibentuk adalah pada saat sedang melakukan peperangan fisik melawan belanda yang bertujuan untuk mengembalikan penjajah dibumi Indonesia. Dan Pada mulanya pemerintah Hindia Belanda melanjutkan politik pemerintahan dengan sistem sentralisasi yang kemudian dibawa arus etische politik yang dikembangkan sistem pemerintahan desentralisasi, namun demikian sistem sentralisasi tetap dipertahankan.

Dalam sistem yang samping menyamping ini kita mengenal bahwa marga-marga disepanjang Sungai Enim yaitu mulai dari semendo darat sampai ke marga tambang patang puluh bubungan dan marga-marga sepanjang sungai lematang mulai dari tamblang ujan mas sampai ke marga sungai rotan digabungkan menjadi satu wilayah administrasi dengan nama Onder af deeling lematang ilir dengan kepala pamarintah yang disebut Controleur yang tunduk pada deeling Palembang sehe Beven landen dengan Resident berkedudukan di Lahat. (Sumber: <http://www.sumselfprov.go.id/>)

2. Lokasi Dan Peta Kabupaten Muara Enim

Kabupaten Muara Enim terletak antara 4° sampai 6° Lintang Selatan dan 104° sampai 106° Bujur Timur. Kabupaten Muara Enim merupakan daerah agraris dengan luas wilayah 7.300,50 terdiri atas 20 kecamatan. Adapun perbatasan wilayah

kabupaten Muara Enim yaitu : bagian utara berbatasan dengan kabupaten Musi Banyuasin, kota Palembang, serta kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Bagian selatan berbatasan dengan kabupaten Ogan Kemering Ulu dan Ogan Komering Ulu Selatan, bagian Timur berbatasan dengan kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kota Prabumulih, bagian barat dengan kabupaten Musi Rawas dan kabupaten Lahat ([https : // www .muaraenimkab .go.id /web /kontent /12 / geografis](https://www.muaraenimkab.go.id/web/kontent/12/geografis)).



Gambar 3.1 Peta Wilayah Kabupaten Muara Enim.

Sumber : www.dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id.

Tabel 3.1
Berdasarkan Desa dan Kelurahan Dirinci Tiap-tiap Kecamatan
di Kabupaten Muara Enim, 2014

No	Kecamatan	Desa		Kelurahan	Jumlah
		Definitif	Persiapan		
1	Semende Darat Laut	10	-	-	10
2	Semende Darat Ulu	10	-	-	10
3	Semende Darat Tengah	12	-	-	12
4	Tanjung Agung	26	-	-	26
5	Rambang	13	-	-	13
6	Lubai	10	-	-	10
7	Lubai Ulu	11	-	-	11
8	Lawang Kidul	4	-	3	7
9	Muara Enim	10	-	6	16
10	Ujan Mas	8	-	-	8
11	Gunung Megang	13	-	-	13
12	Benakat	6	-	-	6
13	Belimbing	10	-	-	10
14	Rambang Dangku	26	-	-	26
15	Gelumbang	22	-	1	23
16	Lembak	10	-	-	10
17	Sungai Rotan	19	-	-	19
18	Muara Belida	8	-	-	8
19	Kelekar	7	-	-	7
20	Belide Darat	10	-	-	10
Jumlah		245	-	10	255

*Sumber : Portal resmi pemerintah diakses dari
<http://www.sumselprov.go.id/>*

Tabel 3.2
Ibu Kota Kecamatan dan Jarak dari
Kota Muara Enim di seluruh
Kabupaten Muara Enim pada Tahun
2014

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Jarak dari Kota Muara Enim (km)
1	Semende Darat Laut	Pulau Panggung	92
2	Semende Darat Ulu	Aremantai	110
3	Semende Darat Tengah	Seri Tanjung	99
4	Tanjung Agung	Tanjung Agung	40
5	Rambang	Sugih Waras	122
6	Lubai	Beringin	120
7	Lawang Kidul	Keban Agung	22
8	Muara Enim	Muara Enim	0
9	Ujan Mas	Ujan Mas Baru	17
10	Gunung Megang	Gunung Megang Dalam	31
11	Benakat	Padang Pindu	34
12	Rambang Dangku	Tebat Agung	65
13	Gelumbang	Gelumbang	121
14	Lembak	Lembak	108
15	Sungai Rotan	Sukarami	150
16	Muara Belida	Patra Tani	160
17	Kelekar	Menanti	120
18	Belimbing	Cinta Kasih	36
19	Belide Darat	Tanjung Bunut	128
20	Lubai Ulu	Karang Agung	151

Sumber: <https://www.muaraenimkab.go.id/web/kependuduk>

3. Keadaan Geografis

Secara geografis posisi Kabupaten Muara Enim terletak antara 4° sampai 6° Lintang Selatan dan 104° sampai 106° Bujur Timur. Kabupaten Muara Enim merupakan daerah agraris dengan luas wilayah 7.300,50 terdiri atas 20 kecamatan. Bumi Serasan Sekundang memiliki batas wilayah Kondisi topografi daerah cukup beragam, daerah dataran tinggi di bagian barat daya, merupakan bagian dari rangkaian pegunungan Bukit Barisan, meliputi Kecamatan Semende Darat Laut, Semende Darat Ulu, Semende darat Tengah dan Kecamatan Tanjung Agung.

Daerah dataran rendah, berada di bagian tengah (Muara Enim, Ujan Mas, Benakat, Gunung Megang, Rambang Dangku, Rambang, Lubai) terus ke utara–timur laut, terdapat daerah rawa yang berhadapan langsung dengan daerah aliran Sungai Musi, meliputi Kecamatan Gelumbang, Sungai Rotan, MuaraBelida. (https://id.m.wikipedia.org/wiki/kabupaten_Muara_Enim).

4. Kependudukan

Pada tahun 2014 kabupaten Muara Enim mengalami peningkatan jumlah penduduk sekitar 590.975 orang. Di bandingkan tahun 2013 penduduk wilayah ini dihuni sekitar 582 ribu orang. Maka dapat disimpulkan selama kurun waktu 2013-2014 terjadi pertumbuhan sebesar 1,61 persen pertahun. Adapun Persebaran penduduk menurut kecamatan di seluruh wilayah kabupaten Muara Enim sebagai berikut: kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Muara Enim. Kecamatan tersebut dihuni sekitar 68.063 penduduk. Sementara kecamatan dengan jumlah penduduk paling rendah adalah Muara Belida. (<https://www.muaraenimkab.go.id/web/kependudukan>).

Kabupaten Muara Enim sebelumnya terdiri dari 22 kecamatan kemudian pada tahun 2012 bertambah tiga kecamatan yaitu Belimbing, Belida Darat, dan Lubai Ulu, sehingga menjadi 25 kecamatan, dan menjadi 20 kecamatan sejak keluarnya UU Nomor 7 tahun 2013, dimana lima kecamatan dalam kabupaten ini, yaitu Talang ubi, penukal utara, Penukal, Abab, dan Tanah Abang, bergabung membentuk kabupaten sendiri yaitu kabupaten penukal abab lematang ilir (PALI) serta berakhir dengan 22 kecamatan dengan ditetapkannya peraturan daerah kabupaten muara enim Nomor 10 tahun 2018.

Tabel 3.3

Penduduk Menurut Kecamatan, Jenis Kelamin, dan Rasio Jenis Kelamin di kabupaten Muara Enim Pertengahan Tahun 2014

No	Kecamatan	Penduduk (Ribuan Jiwa)			Jenis kelamin
		Laki – Laki	Perempuan	Jumlah	
1	Semende Darat Laut	6.588	6.668	13.256	98,80
2	Semende Darat Ulu	8.190	8.214	16.403	99,71
3	Semende Darat Tengah	4.952	5.112	10.064	96,86
4	Tanjung Agung	19.921	18.761	38.683	106,18
5	Rambang	15.137	14.701	29.838	102,97
6	Lubai	14.221	13.762	27.983	103,33
7	Lubai Ulu	17.187	15.542	32.729	110,58
8	Lawang Kidul	33.539	32.273	65.812	103,92
9	Muara Enim	34.573	33.489	68.063	103,24
10	Ujan Mas	12.564	11.896	24.460	105,61
11	Gunung Megang	17.963	17.320	35.283	103,71
12	Benakat	4.642	4.378	9.019	106,03
13	Belimbing	12.761	12.127	24.888	105,23
14	Rambang Dangku	26.231	25.612	51.842	102,42
15	Gelumbang	30.759	29.777	60.536	103,30
16	Lembak	10.180	10.262	20.442	99,21
17	Sungai Rotan	15.232	15.214	30.446	100,12
18	Muara Belida	3.933	3.806	7.739	103,32
19	Kelekar	5.258	5.017	10.275	104,80
20	Belide Darat	6.688	6.525	13.213	102,50
Jumlah		300.519	290.456	590.975	103,46

Sumber: <https://www.muaraenimkab.go.id/web/kependuduk>.

A. Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim

1. Sejarah Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim.

Biro Perencanaan Pembangunan Daerah adalah lembaga teknis daerah di bidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh kepala lembaga, melalui sekretaris daerah (SEKDA) bertanggung jawab kepada Bupati. Serta membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah. Pembentukan Panitia Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada dua unsur sebagai berikut:

- a. Dalam rangka mendorong keserasian pembangunan daerah, perlu diperkuat koordinasi pembangunan departemen dan pembangunan daerah.
- b. Dalam konteks upaya untuk memastikan pembangunan kawasan yang seimbang dan berkelanjutan membutuhkan perencanaan yang lebih komprehensif, tepat sasaran, dan komprehensif.

Berdasarkan pertimbangan di atas Maka dikeluarkan lah Keputusan Presiden No. 27 Tahun 1980. Tentang pedoman organisasi dan tata kerja panitia sekunder perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan kelembagaan mulai direalisasikan dari tingkat nasional hingga daerah (BAPPEDA). Dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pemerintahan daerah, perencanaan daerah berkembang menjadi kewajiban penyelenggaraan daerah.

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1974 mengukuhkan dan mengakui status Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I. Sedangkan untuk daerah sekunder, perintah gubernur tetap berlaku, namun kemudian SK presiden No. 27 Tahun 1980. Badan perencanaan pembangunan daerah tingkat kedua diakui oleh negara, lahirlah Keputusan Presiden, lahirlah badan perencanaan pembangunan daerah tingkat pertama dan kedua. Salah satu aspek penting dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah adalah melalui kebijakan pembangunan daerah yang berkualitas dan berkelanjutan.

2. Visi Dan Misi Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim.

Visi dan misi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim 2018-2023, yang membahas rancangan pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yaitu masyarakat yang mewujudkan agama, persaingan, kemandirian, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Muara Enim. (https://www.muaraenim.go.id/web/kontent/7/visi_misi).

a. Visi

Membayangkan "MUARA ENIM untuk masyarakat yang agamis, berdaya saing, mandiri, sehat dan sejahtera"

1. Muara Enim untuk Rakyat atau RAKYAT, adalah segala potensi sumber daya yang dimiliki Kabupaten Muara Enim, milik rakyat, dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan rakyat.
2. Yang dimaksud dengan "agama" adalah keadaan dimana segala aktivitas seluruh lapisan masyarakat berlandaskan Tuhan Yang Maha Esa dan senantiasa dalam lindungan, lindungan, dan kewaspadaan Tuhan Yang Maha Esa.
3. "Berdaya Saing", adalah kondisi dimana Pemerintahan Kabupaten dan Masyarakat memiliki kemampuan dan keunggulan untuk memenangi kompetensi di segala bidang.
4. "Mandiri", adalah dimana Pemerintahan Kabupaten dan Masyarakat memanfaatkan segala Sumberdaya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan hidupnya menuju tujuan hakiki dari Otonomi Daerah.
5. "Sehat", adalah seluruh lapisan Masyarakat memiliki badan, jiwa dan social yang baik yang memungkinkan hidupnya produktif secara social dan ekonomi.
6. "Sejahtera", adalah dimana seluruh lapisan Masyarakat seluruh kebutuhan dasarnya (sandang, pangan, papan) secara mudah, adil dan merata.

b. Misi

Untuk dapat mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan tantangan kedepan dengan mempertimbangkan peluang yang dimiliki untuk menuju "MUARA ENIM UNTUK RAKYAT YANG AGAMIS, BERDAYA Kayat YANG AGAMIS, BERDAYA Kayat YANG AGAMIS, BERDAYA. Maka rumusan misi kabupaten Muara

Enim dirumuskan dalam pencapaian visi Muara Enim pada tahun 2018-2023 yaitu ada tujuh misi sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
 2. Menciptakan pembinaan anak yatim piatu dan duafa serta memberikan bantuan langsung kepada keluarga kurang mampu.
 3. Meningkatkan daya saing ekonomi daerah melalui produk unggulan desa di sektor agribisnis, agroindustri dan agropolitan.
 4. Menciptakan pendidikan dan kesehatan gratis.
 5. Peningkatan infrastruktur dan suprastruktur dasar secara merata dan mewujudkan jalan TOL Muara Enim-Indralaya-Palembang.
 6. Dapat mempergunakan sumber daya alam agar memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri dengan memperhatikan pengelolaan Tata Ruang dan Lingkungan.
 7. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang professional, serta peningkatan pelayanan publik.
3. Program Kerja Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim.

Dimuat dalam rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) kabupaten Muara Enim menyusun 6 prioritas pembangunan di tahun 2021

- a. Penanggulangan kemiskinan
- b. Pemantapan infrastruktur dasar
- c. Pemerataan layanan pendidikan
- d. Kesehatan yang berkualitas
- e. Pengembangan UMKM Unggul dan industry kreatif
- f. Sumber daya manusia unggul pengelolaan dan penanggulangan bencana.(www.muaraenimkab.go.id)

4. Tugas Dan Fungsi Badan Perencanaan Dan Pembangunan daerah Kabupaten Muara Enim.

Rincian fungsi badan perencanaan dan pembangunan daerah (BAPPEDA). Adapun fungsinya sebagai berikut seperti yang di muat dalam PERBUP NO 25 TAHUN 2017.

- a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- e. pengelolaan kesekretariatan meliputi umum dan kepegawaian, perencanaan, dan keuangan.

- f. pelaksanaan pengawasan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (Perbup No.25 Tahun 2017).

5. Data Permasalahan Pembangunan Jalan Di Kabupaten Muara Enim

Pembangunan infrastruktur jalan di daerah kabupaten Muara Enim yang belum merata serta masih terjadi perbaikan jalan seperti yang disampaikan oleh masing-masing dapil dari tiap wilayah Anggota DPRD Muara Enim Dapil III, Rani Kodim dalam penyampaian mengutarakan pelaksanaan reses yang dilaksanakan dewan Dapil III pada 17-21 Februari di Kecamatan Gelumbang, Lembak, Kelekar, Belida Darat, Sungai Rotan dan Muara Belida.

Adapun usulan program hasil reses pertama Dapil tiga diantaranya pelebaran dan perawatan jalan sepanjang 5 km di Desa Karang Jaya, serta 2 km di Desa Tanjung Buntut. Hasil dari Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim melakukan kegiatan Reses Tahap I Tahun 2020 guna menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

Hasilnya pembangunan infrastruktur jalan masih menjadi permasalahan dominan yang dikeluhkan masyarakat. Hal itu tertuang dalam sidang paripurna agenda laporan hasil pelaksanaan reses tahap I tahun 2020 oleh setiap daerah pemilihan (dapil) yang digelar di gedung DPRD Muara Enim. (<https://sumeks.co/jalan-rusak-perusahaan-minim-serap-tenaga-lokal,diakses-pada-tanggal-2-november-2020>).

Kasus pembangunan jalan di kabupaten Muara Enim sudah banyak terjadi salah satunya KPK menangkap 3 saksi terkait OTT suap pembangunan jalan Muara Enim seperti yang di laporkan reporter Irwanto pada 6 agustus 2020 didalam kasus OTT proyek pembangunan jalan itu melibatkan mantan bupati muara enim Ahmad yani serta Elfin muchtar dan penyuap Robi okta fahlevi yang merupakan pemilik PT Enra sari selaku pemenang lelang proyek. Kasus ini bermula saat pengerjaan pembangunan jalan pada tahun 2019 di daerah kabupaten Muara Enim (<https://m.merdeka.com/peristiwa/kpk-kembali-periksa-3-saksi-terkait-ott-suap-pembangunan-jalan-Muara-Enim.html>).

Peningkatan Pengawasan diperlukan untuk menjamin terlaksananya pemerintahan yang bersih adapun peran pengawasan ialah sebagai media kontrol aktivitas ke pemerintahan agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Dan tugas dari pada inspektorat sendiri yaitu sebagai suatu lembaga yang melakukan pengawasan

Salah satu usaha yang dilakukan Tim inspektorat kabupaten Muara Enim.

Dalam melakukan pengawasan maka perlu melakukan pengecekan perencanaan pembangunan infrastruktur jalan di kabupaten Muara Enim, baik dituangkan dalam agenda laporan pertahunan atau pun dengan melakukan pengawasan langsung ke lapangan. Berdasarkan data perbup no 2 tahun 2020 di atas yang menjadi permasalahan dan perlu pengawasan inspektorat yaitu di inspektur pembantu wilayah bagian empat pada badan perencanaan dan pembangunan daerah. Seperti halnya dalam perencanaan pembangunan infrastruktur jalan, permasalahan infrastruktur jalan masyarakat nya banyak mengeluhkan masalah perbaikan dan pembangunan jalan di daerah Muara Enim.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan dan menggambarkan bagaimana Efektivitas Pengawasan Inspektorat Terhadap Kinerja Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Dalam Perencanaan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Muara Enim. Dengan menggunakan delapan tahap analisis berdasarkan Teori efektivitas pengawasan dari Makmur yang digunakan untuk menganalisis efektivitas pengawasan. Adapun unsur-unsur dapat di katakan efektivitas suatu pengawasan yaitu, ketepatan penentuan waktu, ketepatan perhitungan biaya, ketepatan dalam pengukuran, ketepatan dalam menentukan pilihan, ketepatan berpikir, ketepatan dalam melakukan perintah, ketepatan dalam menentukan tujuan, ketepatan-ketepatan sasaran.

Kedelapan unsur tersebut akan di uraikan satu persatu, sehingga tahap pertama sampai kedelapan unsur tersebut akan menggambarkan jawaban rumusan masalah tentang efektivitas pengawasan inspektorat terhadap kinerja badan perencanaan dan pembangunan daerah dalam perencanaan infrastruktur jalan di Kabupaten Muara Enim. Teori efektivitas pengawasan dari Makmur dianggap peneliti mampu untuk menganalisa masalah yang timbul di masyarakat tentang infrastruktur jalan di kabupaten Muara Enim karena dapat di katakan efektivitas suatu pekerjaan infrastruktur jalan tersebut di Kabupaten Muara Enim jika sudah efektif baik dari perencanaan, maupun pengawasan yang di lakukan untuk mengefektifitaskan pengawasan inspektorat terhadap kinerja Bappeda dalam perencanaan infrastruktur jalan di Kabupaten Muara Enim yang lebih efektif ke depan nya.

Dalam mewujudkan efektivitas pengawasan yang dilakukan pihak Inspektorat salah satu upaya yang di lakukan oleh pihak inspektorat yaitu meningkatkan pengawasan inspektorat itu sendiri, serta dapat di katakan pengawasan itu sudah efektivitas jika sudah memenuhi dari kedelapan unsur yang ada di dalam teori efektivitas pengawasan.

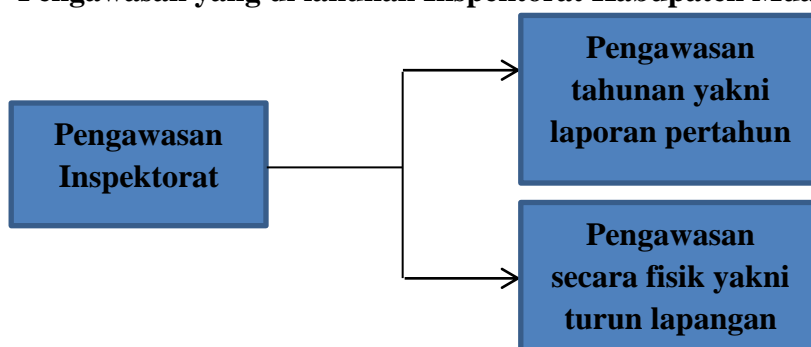
A. Ketepatan Penentuan Waktu

Tahap pertama analisis terhadap ketepatan penentuan waktu dalam melakukan pengawasan, ketepatan waktu dalam Pengawasan inilah yang menentukan keberhasilan kegiatan yang dilakukan dalam organisasi. Lagi-lagi hal ini akan sangat mengakibatkan kegagalan kegiatan internal organisasi, sehingga penggunaan waktu yang tepat akan meningkatkan efektifitas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam rencana infrastruktur jalan Kabupaten Muara Enim.

Dalam hal ini, Biro Inspektorat melakukan pengawasan infrastruktur jalan di Kabupaten Muara Enim berupa pengawasan rutin di akhir tahun, dan melakukan pengawasan fisik di tempat, dan mengawasi langsung pembangunan proyek infrastruktur jalan. Dalam melakukan pengawasan terhadap badan perencanaan dan pembangunan daerah dalam hal perencanaan infrastruktur jalan pihak inspektorat telah melakukan pemeriksaan secara regular untuk laporan setiap pertahunnya di badan perencanaan dan pembangunan daerah.

Gambar 4.1

Pengawasan yang di lakukan Inspektorat Kabupaten Muara Enim



Sumber : Di olah peneliti berdasarkan data dari Inspektorat Kabupaten Muara Enim

Berdasarkan bagan 4.1 bahwa pengawasan inspektorat itu rutin di lakukan secara pengawasan regular yakni pemeriksaan laporan di akhir tahun, sedangkan pengawasan secara fisik yang di lakukan di lapangan itu dilakukan setiap 6 bulan sekali setelah proyek infrastruktur jalan tersebut di jalankan sesuai perencanaan yang telah di tetapkan sebelumnya. Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Muara Enim tahun 2018-2023 adalah “Muara Enim Untuk Rakyat Yang Agamis, Berdaya Saing, Mandiri, Sehat Dan Sejahtera”. Visi tersebut kemudian di terjemahkan dalam 7 misi yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa, cerdas dan mandiri.
2. Mewujudkan bantuan langsung untuk membina anak yatim, yatim piatu dan keluarga yang membutuhkan, serta mewujudkan kemandirian.

3. Peningkatan ekonomi daerah dengan memajukan pedesaan pada produk sektor agrobisnis, agroindustri dan agro-urban.
4. Menciptakan pendidikan dan kesehatan gratis.
5. Peningkatan kualitas infrastruktur dan suprastruktur secara merata, serta mewujudkan jalan tol Muara Enim-Indralaya-Palembang.
6. Mempertimbangkan tata ruang dan pengelolaan lingkungan, serta pemanfaatan sumber daya alam pada kebutuhan masyarakat dan industri.
7. Mewujudkan profesionalisasi, kredibilitas, dan pemerintahan yang berorientasi, serta meningkatkan tingkat pelayanan publik.

Dalam visi dan Misi inilah tertuang dalam poin ke lima perlu meningkatkan infrastruktur jalan di kabupaten Muara Enim untuk itu sangat di perlukan peran pengawasan di tingkatkan sebagai dasar untuk mengefektivaskan pengawasan maka peran penentuan waktu dalam suatu pekerjaan sangat perlu di dimanfaatkan dengan baik untuk dapat di kata kan efektivitas suatu pengawasan tersebut.

Peneliti juga menganalisis dari segi penentuan waktu yang di lakukan dalam pengawasan inspektorat dalam perencanaan infrastruktur jalan, Inspektorat melakukan pengawasan secara OPD di Bappeda dalam hal ini berupa laporan pertahunnya yang di awasi oleh pihak Inspektorat sebagai bentuk kinerja yang di rancang oleh pihak Bappeda dalam hal perencanaan pembangunan infrastruktur di awal tahun dan sebagai laporan dari pada terlaksana nya kinerja yang telah di rancang di awal tahun di laporkan dalam bentuk laporan akhir tahun. Berikut adalah hasil wawancara dengan bagian auditor madia yakni ibu Yeti, terkait penentuan waktu pengawasan yang di lakukan inspektorat dalam perencanaan infrastruktur jalan di Kabupaten Muara Enim.

“Upaya dari pada pengawasan yang di lakukan inspektorat yakni melakukan pemeriksaan di setiap OPD bahkan pemeriksaan itu di lakukan hingga ke lapangan dan bila di temukan masalah di lapangan dalam pembangunan infrastruktur jalan maka temuan masalah itu di lampirkan dalam laporan dan di tindak lanjuti oleh kepala daerah, selain itu inspektorat juga melakukan pengawasan secara administrasi. Adapun beberapa strategi yang di lakukan inspektorat dalam meningkatkan pengawasan agar lebih efektif dilakukan oleh seluruh perangkat daerah yakni berupa proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dengan melakukan

pemeriksaan baik secara pemeriksaan administrasi maupun pengawasan di lapangan secara langsung dan di lakukan secara rutin atau bahkan di tingkat kan ke depannya”

Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian auditor madia dapat disimpulkan bahwa perlu adanya peningkatan pengawasan terhadap kinerja Bappeda yang dalam hal ini berperan sebagai suatu lembaga pensinkronisasi dari pada perencanaan yang akan di lakukan untuk Infrastruktur jalan di Kabupaten Muara Enim, hanya saja dalam hal pengawasan Inspektorat ini belum mengawasi secara fisik terhadap Badan perencanaan dan pembangunan daerah pihak Inspektorat hanya memeriksa dan melakukan pengawasan secara regular yang artinya pengawasan yang sudah terprogram untuk di lakukan setiap pertahunnya.

B. Ketepatan Perhitungan Biaya

Tahap Kedua analisis terhadap ketepatan perhitungan biaya dalam melakukan perencanaan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Muara Enim, ketepatan biaya dalam perencanaan adalah ketepatan dalam pemanfaatan biaya terhadap sesuatu kegiatan, dalam arti bahwa tidak mengalami kekurangan sampai kegiatan itu dapat terselesaikan. Demikian pula sebaliknya tidak mengalami kelebihan pembiayaan sampai kegiatan tersebut dapat di selesaikan dengan baik dan hasilnya memuaskan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Karena ketepatan perhitungan biaya dalam perencanaan merupakan salah satu unsur dari pada efektivitas.

Penyusunan perencanaan infrastruktur jalan diadakan setiap awal tahun dari adanya (MUSRENBAG) meliputi musrenbag desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, pusat itu di susun 1 tahun sebelum pelaksanaan dan dalam perencanaan pembangunan khusus di tahun 2019-2020 itu mengalami kendala karena adanya covid-19 dan dana anggaran nya itu di alihkan untuk penanganan covid-19.



Gambar 4.2 penyusunan Musrenbang RKPD 2020

Sumber: <http://kabarmuaraenim.com/2020/03/18/gelarmusrenbang-rkpd-2020-pemkab-muara-enim-agendakan-6-prioritas-pembangunan/>

Berdasarkan gambar di atas hasil Musrenbang RKPD kabupaten Muara Enim tahun 2020 program dan kegiatan yang telah disusun dan mereka sepakati akan menjadi bahan penyusunan rancangan akhir RKPD untuk di tahun 2021 dengan memprioritaskan ada 6 prioritas pembangunan tahun 2021

Dalam penyusunan Musrenbang kabupaten untuk pembangunan infrastruktur jalan maka di perlukan ketepatan perhitungan biaya perencanaan pembangunan infrastruktur dari awal perencanaan sampai akhir pembangunan di akhir tahun dapat berubah misalnya di dalam perencanaan awal akan membangun infrastruktur di beberapa daerah akan tetapi di akhir tahun ada yang tidak dapat di bangun infrastruktur jalan nya sesuai perencanaan di awal tahun tadi karena pihak Bappeda melihat anggaran nya terlebih dahulu saat akan melakukan pembangunan infrastruktur jalan di daerah-daerah. Berikut hasil wawancara dengan bagian Kabid Infrastruktur Dan Kewilayahan yakni (ibu Yulia)

“perencanaan itu harus tuntas dalam satu tahun dan di rancang setiap di awal tahun hanya saja untuk pembangunannya di lapangan yang dalam hal ini di lakukan oleh dinas terkait pihak PUPR bisa saja dalam pertahunnya tidak semuanya tuntas karena menyesuaikan keuangan dan untuk anggaran pembangunan infrastruktur itu sendiri menggunakan anggaran sebanyak 25% dari APBD kabupaten Muara Enim. Pihak Bappeda sendiri dalam hal perencanaan infrastruktur jalan yang dimuat dalam musrenbag yang terdiri dari usulan desa,

kecamatan, itu semua kita usahakan untuk bisa di masukkan dalam perencanaan di awal tahunnya akan tetapi untuk melakukan pembangunan infrastruktur jalan nya maka pihak tehknis terkait dan perwakilan dari Bappeda akan mengecek langsung melihat kondisi dilapangannya”

Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian kbid infrastruktur dan kewilayahan di kabupaten Muara Enim maka dapat disimpulkan bahwasannya pihak Bappeda mengupayakan semua usulan dari desa maupun kecamatan yang ada di Muara Enim terkait perencanaan infrastruktur jalan di upayakan di muat semua dalam musyawarah rencana pembangunan infrastruktur jalan kabupaten akan tetapi sebelum menetapkan di daerah mana saja yang akan di adakan pembangunan maupun perbaikan infrastruktur jalan pihak Bappeda perlu memperhitungan biaya untuk anggaran infrastruktur tersebut seperti hasil dari pada wawancara dengan bagian kbid infrastruktur yakni ibu yulia bahwasannya untuk anggaran pembangunan infrastruktur itu 25% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Muara Enim.

C. Ketepatan Dalam Pengukuran

Tahap ketiga analisis terhadap Ketepatan pengukuran kegiatan yang dilakukan selalu memiliki kriteria keberhasilan tertentu. Ketepatan tindakan yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan yang dipercayakan kepada kami merupakan bagian dari efektivitas. Dalam melakukan pengawasan tahunan, perlu dilakukan evaluasi terhadap pekerjaan pengawasan agar tercapai pengawasan yang efektif terhadap pekerjaan yang dilakukan.

Inspektorat mengawasi perencanaan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran anggaran (RKA), dan meninjau keberhasilan kinerja rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana pembangunan jangka menengah jangka panjang (RPPD) daerah terkait ke departemen perencanaan infrastruktur jalan OPD. Berikut hasil wawancara dengan bagian perencanaan Inspektorat Kabupaten Muara Enim yaitu (Pak Riza)

“ Adapun pengukuran keberhasilan kinerja Bappeda dalam perencanaan infrastruktur jalan di Kabupaten Muara Enim yakni dengan melakukan pengawasan fungsional oleh pihak inspektorat dapat di lihat dari keberhasilan RPJMD berupa target rencana strategis (RENSTRA), rencana kerja (RENJA) nya tercapai atau tidak untuk itu Inspektorat melakukan pengawasan terhadap hasil dari capaian-capaian kinerja

Infrastruktur jalan baik dari segi perencanaan nya, pembangunannya di lapangan agar terwujudnya sesuai dengan visi misi kinerja Bupati”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua bagian perencanaan pengawasan inspektorat kabupaten Muara Enim, menurutnya dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Bappeda dalam perencanaan infrastruktur jalan dapat dilihat dari keberhasilan RPJMD berupa target rencana strategis (RENSTRA), rencana kerja (RENJA) nya tercapai atau tidak. Maka dapat disimpulkan ketepatan pengukuran kinerja dalam pengawasan yang dilakukan inspektorat sangat di perlukan agar tercapainya pengawasan yang efektivitas.

D. Ketepatan Dalam Menentukan Pilihan

Tahap keempat analisis Mengenai ketepatan pilihan, pilihan pekerjaan yang salah berarti tindakan yang dilakukan tidak sah dan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, pilihan yang tepat harus ditentukan saat membuat rencana. Mengenai perencanaan infrastruktur jalan di Kabupaten Muara Enim, perencanaan dapat dikatakan sebagai suatu proses di mana tujuan, bukti faktual dan asumsi ditransformasikan menjadi proses argumentasi logis untuk melaksanakan kebijakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan tersebut. Akan ditetapkan. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Bidang Infrastruktur dan Urusan Daerah (Ibu Yulia).

“perencanaan infrastruktur jalan yang dimuat dalam musrenbag yang terdiri dari usulan desa, kecamatan, itu semua kita usahakan untuk bisa dimasukkan dalam perencanaan di awal tahunnya akan tetapi untuk melakukan pembangunan infrastruktur jalan nya maka pihak teknis terkait dan perwakilan dari Bappeda akan mengecek langsung melihat kondisi dilapangannya agar dapat menentukan daerah mana saja yang akan diadakan pembangunan infrastruktur jalan karena kalau mau dilakukan secara serentak pembangunan infrastruktur jalan di seluruh kabupaten Muara Enim itu tidak akan bisa karena anggaran Infrastruktur bukan hanya untuk pembangunan jalan saja”.

Berdasarkan wawancara dengan kabid infrastruktur dan kewilayahan berdasarkan ketepatan menentukan pilihan untuk perencanaan infrastruktur jalan di Kabupaten Muara Enim maka dapat disimpulkan pihak Bappeda ini sudah

mengupayakan yang terbaik untuk infrastruktur jalan akan tetapi dalam satu tahun perencanaan yang telah di susun di awal tahun belum tentu dapat terlaksana semua di akhir tahun. Karena melihat anggaran dan juga situasi di lapangan nya. Maka untuk itu pihak Bappeda di harapkan untuk dapat segera meminimalisir masalah infrastruktur jalan di kabupaten Muara Enim baik itu yang belum terlaksana di perencanaan maupun harus menyesuaikan antara perencanaan itu di awal tahun dengan hasil laporan di akhir tahun.

E. Ketepatan Berpikir

Tahap kelima ketepatan analisis terhadap ketepatan berpikir akan mendapatkan hasil yang maksimal di dalam melakukan pengawasan inspektorat telah melakukan pengawasan regular yakni rutin di lakukan dengan pemeriksaan laporan di akhir tahun dan juga melakukan pengawasan secara fisik turun ke lapangan langsung, akan tetapi dalam hal perencanaan ini Inspektorat belum melakukan pengawasan secara fisik di Bappeda dan dalam penyusunan perencanaan itu pihak inspektorat belum di ikut sertakan dalam penyusunan perencanaan tersebut seperti yang di kemukkan oleh auditor muda di inspektorat sebagai berikut

“Agar lebih efektif pengawasan Inspektorat perlu ke depannya dinas-dinas terkait dalam pengawasan ini di ikut sertakan aparatur pengawasan internal pemerintah (APIP) dalam penyusunan perencanaan yang di lakukan baik dari dinas terkait pembangunannya berupa dinas PUPR dan disinkronisasikan perencanaan itu oleh pihak BAPPEDA dan sebaik nya APIP ini di ikut sertakan dalam perencanaannya juga karena biasanya APIP ini melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang sudah di lakukan saja. Maka strategi dari pada Inspektorat ke depannya agar lebih efektif dalam melakukan pengawasan dalam penyusunan awal perencanaan infrastrukturnya Akan tetapi untuk itu kami masih menunggu arahan dari atasan atau pimpinan”(Agus Wijaya).

Dalam mengefektifvitaskan program kerja pengawasan tahunan maka di perlukan kerja sama dari semua pihak pengawasan di Inspektorat dengan melibatkan pihak APIP ini di dalam perencanaan pengawasan yang akan di lakukan baik dari dari penyusunan perencanaannya sampai pemeriksaan fisik di lapangan. Serta inspektorat juga perlu ke depannya melakukan pengawasan terhadap BAPPEDA bukan dari laporan tahunan-nya saja akan tetapi

mulai dari perencanaan infrastruktur jalan nya pun inspektorat perlu mengetahui perencanaan infrastruktur jalan yang akan di bangun atau dikerjakan di Kabupaten Muara Enim setiap tahun nya.

Maka dapat di simpulkan bahwa dalam analisis ketepatan berpikir ini pihak inspektorat itu perlu untuk di ikut sertakan dari awal perencanaan hingga pembangunan proyek infrastruktur jalan tersebut di lakukan agar pihak inspektorat ini dapat melakukan pengawasan dari awal sampai akhir di adakan nya pembangunan infrastruktur jalan. Bukan hanya sekedar melakukan pengawasan laporan saja di akhir tahun atau melakukan pengecekan langsung ke lapangan.

F. Ketepatan Dalam Melakukan Perintah

Tahap keenam melakukan analisis terhadap ketepatan dalam melakukan perintah keberhasilan suatu pekerjaan sangat banyak di pengaruhi oleh kemampuan seorang pemimpin. Kinerja aparatur pengawasan internal pemerintah (APIP) untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan. Inspektorat secara rutin melakukan pengawasan regular yang dalam artian ini suatu program yang telah tersusun dalam penjadwalan di dalam PKPT dari januari sampai juni Inspektorat melakukan pengawasan ke lapangan setiap enam bulan sekali dan melakukan pengawasan pemeriksaan terhadap laporan perencanaan di awal tahun dan kemudian di akhir tahunnya diadakan pemeriksaan.

Hasil dari pada pengawasan langsung kelapangan yang di lakukan Inspektorat bahwa selama pembangunan Infrastruktur jalan itu berlangsung banyak di temukan masalah pembangunan infrastruktur jalan misal nya jalan yang di bangun kurang tebal, ukuran panjang nya tidak pas tidak sesuai dari pada laporan di perencanaan yang telah di buat untuk infrastruktur jalan di Kabupaten Muara Enim.

Maka untuk itu dalam mengatasi penyalahgunaan kewenangan baik dari sisi perencanaan maupun dari proyek pembangunan Infrastruktur jalan untuk peningkatan pengawasan Inspektorat itu sangat perlu di tingkatkan lagi pengawasannya terutama di Bappeda selaku perencanaan dan di dinas tehknis PUPR selaku yang melakukan pembangunan Infrastruktur jalan di seluruh Kabupaten Muara Enim untuk meminimalisirkan dari pada yang dikeluhkan oleh masyarakat yakni pembangunan maupun perencanaan Infrastruktur jalan yang belum maksimal agar dapat terwujudnya pengawasan yang efektif lagi di tahun berikutnya. Berikut hasil wawancara dengan bagian perencanaan pengawasan inspektorat (Pak Riza)

“Jadi untuk meminimalisir keterhambatan yang terjadi di tahun sebelumnya maka di tahun berikutnya semua harus di tuntaskan Untuk itu di tahun yang akan datang Inspektorat akan melakukan probity audit terkait anggaran yang sudah terlaksana di tahun berjalan. Untuk itu mengevaluasi kinerja yang telah di lakukan sangat di perlukan agar dapat terwujudnya efektivitas pengawasan yang akan di lakukan”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian perencanaan inspektorat bahwasannya untuk meningkatkan pengawasan inspektorat ke depan nya akan melakukan probity audit kegiatan penilaian terhadap suatu pekerjaan yang telah di lakukan.

G. Ketepatan Dalam Menentukan Tujuan

Tahap ketujuh melakukan analisis terhadap menentukan Tujuan yang ditetapkan secara tepat akan sangat menentukan efektivitas pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan terutama yang berorientasi kepada jangka panjang. Berikut hasil wawancara dengan bagian auditor muda inspektorat (Pak Agus)

“Dalam menentukan tujuan untuk program kerja pengawasan tahunan maka di perlukan kerja sama dari semua pihak pengawasan di Inspektorat dengan melibatkan pihak APIP ini di dalam perencanaan pengawasan yang akan di lakukan baik dari dari penyusunan perencanaan nya sampai pemeriksaan fisik di lapangan. Serta inspektorat juga perlu ke depan nya melakukan pengawasan terhadap Bappeda bukan dari laporan tahunan-nya saja akan tetapi mulai dari perencanaan infrastruktur jalan nya pun inspektorat perlu mengetahui perencanaan infrastruktur jalan yang akan di bangunan atau dikerjakan di Kabupaten Muara Enim setiap tahun nya”.

Berikut dapat di simpulkan bahwa dalam melakukan pengawasan setiap pertahunnya kita perlu melakukan evaluasi terhadap pekerjaan yang kita awasi agar dapat terwujudnya pengawasan yang efektif terhadap pekerjaan yang di lakukan. Tujuan nya tak lain agar terciptanya pengawasan yang efektif dan dapat meminimalisir masalah infrastruktur jalan di Kabuapten Muara Enim.

H. Ketepatan-Ketepatan Sasaran

Tahap analisis ke delapan yakni ketepatan sasaran, penentuan sasaran yang baik di tetapkan secara individu maupun sasaran yang di tetapkan organisasi sesungguhnya sangat menentukan keberhasilan

aktivitas dari suatu pekerjaan. Akan tetapi di dalam ketepatan sasaran tentu saja pasti ada faktor pendukung maupun faktor penghambat dalam meng-efektivitaskan pengawasan inspektorat terhadap kinerja dinas terkait dalam Infrastruktur jalan, faktor penghambat dalam pembangunan Infrastruktur jalan yaitu dari faktor kualitas SDM yang ada di Inspektorat kabupaten Muara Enim adapun faktor pendukung dari pengawasan Inspektorat yaitu berupa wewenang penuh yang di berikan oleh bupati Muara Enim untuk melakukan pengawasan terhadap tiap-tiap OPD. Berikut hasil wawancara dengan bagian perencanaan pengawasan inspektorat.(Pak Riza)

“Pengawasan khusus nya di tahun 2019-2020 untuk kinerja infrastruktur jalan di kabupaten Muara Enim itu tidak tercapai di karenakan terjadi pandemic covid-19 yang menyebabkan seluruh kegiatan infrastruktur jalan banyak yang tertunda itu di muat dalam laporan hasil rekapitulasi tahunan untuk mengatasi keterhambatan dalam pengawasan terhadap perencanaan pembangunan Infrastruktur jalan Inspektorat kembali menekankan bahwa seperti visi-misi Bupati Muara Enim bahwa jika terjadi keterhambatan dalam melakukan pembangunan maupun pengawasan terhadap Infrastruktur jalan ditahun sebelumnya maka ditahun berikutnya harus di selesaikan”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua bagian perencanaan pengawasan inspektorat kabupaten Muara Enim maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019-2020 untuk perencanaan Infrastruktur jalan itu tidak berjalan karena keterhambatan dengan adanya pandemic covid-19 yang dana anggaran nya di alihkan untuk menangani pandemic covid-19 di Kabupaten Muara Enim. Jadi untuk meminimalisirkan keterhambatan yang terjadi di tahun sebelumnya maka di tahun berikutnya semua harus di tuntaskan.

Untuk itu di tahun yang akan datang Inspektorat akan melakukan probity audit terkait anggaran yang sudah terlaksana di tahun berjalan. Untuk itu mengevaluasi kinerja yang telah di lakukan sangat di perlukan agar dapat terwujudnya efektivitas pengawasan yang akan di lakukan. Tidak hanya dari pengawasan inspektorat saja yang tidak berjalan namun Adapun kendala dari pihak Bappeda dalam hal perencanaan pembangunan infrastruktur ini terkendala karena pandemic covid-19 yang terjadi di tahun 2019-2020 yang anggaran nya di utamakan untuk penanganan covid-19. Jadi sudah dapat di

simpulkan dalam masa periode 2018-2023 itu di tahun 2019 sampai sekarang pembangunan infrastruktur jalan itu terhambat karena kurang nya anggaran dan pandemic covid-19.

Akan tetapi pihak Bappeda kedepannya perlu segera mungkin untuk mengoptimalkan antara perencanaan di awal dengan laporan di akhir tahun untuk pembangunan infrastrukturnya itu sesuai dan dengan adanya kendala karena pandemic covid-19 di tahun yang telah berlalu maka di tahun yang akan datang untuk perencanaan infrastruktur jalan di seluruh wilayah Kabupaten Muara Enim perlu untuk di tingkatkan kembali baik kinerja dinas tehknis maupun pengawasan dan juga perencanaannya untuk infrastruktur jalan perlu di tingkatkan lagi agar dapat meminimalisir keluhan dari masyarakat yang mengeluhkan tentang pembangunan atau perbaikan infrastruktur jalan di seluruh wilayah Kabupaten Muara Enim.

Adapun Hasil dari Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim melakukan kegiatan Reses Tahap I Tahun 2020 guna menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Hasilnya, pembangunan Infrastruktur jalan masih menjadi permasalahan dominan yang dikeluhkan masyarakat. Hal itu tertuang dalam sidang paripurna agenda laporan hasil pelaksanaan reses tahap I tahun 2020 oleh setiap daerah pemilihan (dapil).



Gambar 4.3 ketua DPRD menyerahkan laporan laporan reses dewan kepada Plt Bupati Muara Enim.

Sumber: <https://sumeks.co/jalan-rusak-perusahaan-minim-serap-tenaga-lokal>.

Berdasarkan gambar diatas Hasil dari pada laporan reses tahap 1 yang di lakukan oleh anggota dewan dari masing-masing dapil, pembangunan Infrastruktur jalan masih menjadi permasalahan dominan yang dikeluhkan masyarakat. Hal itu tertuang dalam sidang paripurna agenda laporan hasil pelaksanaan reses tahap I tahun 2020 oleh setiap daerah pemilihan (dapil).

Untuk itu sangat di perlukan peningkatan kinerja dari pihak BAPPEDA selaku yang melakukan penyusunan RPJMD untuk dapat meminimalisirkan permasalahan perencanaan infrastruktur jalan tersebut agar segera dapat di minimalisirkan ditahun-tahun berikutnya. Adapun tanggapan dari pihak BAPPEDA terkait reses tahap 1 di tahun 2020 yaitu (bapak andrian)

“Terkait dengan reses sebenarnya telah sesuai dengan ri 86 tahun 2017 yang mengatur mengenai tahapan-tahapan perencanaan dan pokok-pokok pikiran dewan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, hasil reses nya itu telah di input melalui e-planning dan di bahas secara teknis dan disesuaikan terhadap kemampuan keuangan daerah oleh perangkat daerah yang membidangi pada masing-masing usulan reses terkait dengan tidak semua usulan reses diakomodir, hal tersebut di sesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah yang telah di tetapkan”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian Ksb analisis ekonomi makro, kewilayahan dan data, maka dapat di simpulkan bahwasannya untuk hasil reses tahap 1 tahun 2020 tersebut yang di lakukan oleh anggota DPRD Muara Enim itu telah di input dan di bahas secara teknis oleh pihak BAPPEDA akan tetapi di sesuaikan lagi dengan kemampuan keuangan daerah, maka dari itu ada kemungkinan tidak seluruh hasil usulan reses tersebut dapat di laksanakan karena disesuaikan dengan prioritas perencanaan pembangunan daerah yang telah di tetapkan dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Efektivitas Pengawasan Inspektorat terhadap kinerja BAPPEDA dalam Perencanaan Infrastruktur Jalan dikabupaten Muara Enim. Maka dari penelitian ini, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa:

Pengawasan yang di lakukan Inspektorat untuk saat ini pihak inspektorat telah melakukan pengawasan secara regular yakni rutin di lakukan setiap pertahunnya, baik pemeriksaan laporan di akhir tahun maupun pengawasan di lapangan. Akan tetapi pihak inspektorat ini belum melakukan pengawasan secara fisik terhadap kinerja BAPPEDA dalam hal perencanaan infrastruktur jalan di Kabupaten Muara Enim, Perencanaan maupun pengawasan infrastruktur jalan di tahun 2019-2020 itu terkendala karena adanya pandemic covid-19. Akibat nya menimbulkan permasalahan infrastruktur jalan yang banyak di keluhkan masyarakat karena banyak jalan di daerah-daerah yang sudah rusak dan perlu perbaikan. Maka perlu di tingkatkan kinerja Bappeda dalam hal perencanaan infrastruktur untuk dapat meminimalisirkan infrastruktur jalan di Kabupaten Muara Enim serta adapun strategi Inspektorat dalam meningkatkan pengawasan agar lebih efektif ke depan nya yakni mulai dari penyusunan anggaran untuk perencanaan pembangunan infrastruktur jalan setelah itu melakukan review rencana kerja anggaran (RKA) dan untuk ditahun yang akan datang Inspektorat akan melakukan probity audit yakni dapat didefinisikan sebagai kegiatan penilaian terkait anggaran yang sudah terlaksana di tahun berjalan. Dan kinerja BAPPEDA harus dapat menyesuaikan antara perencanaan yang telah disusun dengan hasil akhir dari pada kinerja pembangunan di akhir tahun nya, dan untuk kendala yang terhambat di tahun sebelumnya itu harus segera di minimalisirkan agar permasalahan infrastruktur jalan di Kabupaten Muara Enim ini segera dapat teratasi.

B. Saran

Penelitian yang dilakukan telah berhasil mendeskripsikan bagaimana efektivitas pengawasan Inspektorat terhadap kinerja BAPPEDA dalam perencanaan Infrastruktur Jalan dikabupaten Muara Enim. Maka saran dari penelitian ini adalah:

1. Perlu adanya peningkatan pengawasan Inspektorat agar terwujudnya pengawasan yang efektif dan efisien terhadap

perencanaan Pembangunan Infrastruktur jalan agar dapat mengurangi permasalahan Infrastruktur jalan di Kabupaten Muara Enim.

2. Program kerja pengawasan tahunan (PKPT) yang di lakukan baik secara administrasi dalam bentuk laporan di akhir tahun maupun secara fisik melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan itu perlu di lakukan secara rutin dan di tingkatkan untuk pemeriksaan langsung ke lapangan nya agar dapat mengetahui secara detail proses pembangunan yang sedang berjalan.
3. Serta di harapkan untuk penyusunan perencanaan infrastruktur jalan itu di minimalisirkan dapat terlaksana semua dalam satu tahunnya sesuai dengan yang telah di rancang di awal tahunnya oleh pihak BAPPEDA.
4. Dan diharapkan baik dari perencanaan, pembangunan, dan pengawasan dalam perencanaan pembangunan infrastruktur jalan di kabupaten Muara Enim ini di tingkatkan lagi ke depannya kinerja dari semua pihak yang terlibat dalam infrastruktur jalan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Halim, Muhammad syam kusufi. (2018). *Akuntansi sektor publik*, Jakarta: Selemba Empat.
- Deddy Supriadi, Bratakusumah. (2004). *Perencanaan Pembangunan Daerah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Desmita. (2008). *Psikologi perkembangan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Emzir. (2010). *metode penelitian kualitatif analisis data*, Jakarta: Rajawali.
- Handyaningrat. (2012). *Pengantar studi ilmu administrasi dan manajemen*. Jakarta: Haji masagung.
- Harbani Pasolong. (2013). *Teori administrasi publik*, Bandung: CV. Alfabeta.
- Kadarisman. (2013). *Manajemen pengembangan sumber daya manusia*, Depok: Raja Grafindo Persada.
- Kompas. (2001). *Profil daerah kabupaten dan kota jilid 1*, Jakarta: Buku kompas.
- Lisa Harrison. (2016). *Metodelogi Penelitian Politik*, Jakarta: PT Kharisma putra utama.
- Makmur. (2011). *Efektifitas kebijakan kelembagaan pengawasan*, Bandung: PT Rafika Aditama.
- Maringan Masri, Simbolon. (2013). *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: Ghalia.
- Rahardja, Adsasmita. (2011). *Manajemen Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: Graha ilmu.
- Raharjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011.
- S. Aminah. Roikan.(2019). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*, Jakarta Timur: Prenada Media Group.

- Siswanto, Sunarno. (2012). *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sukanto, Reksohadiprodjo. (2002). *Dasar–dasar Manajemen*. Yogyakarta: BPF.
- Supriyono. (2000). *Sistem Pengendalian Manajemen*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Sumarsono. (2010). *Sosiolinguistik*, Yogyakarta: Sabda.
- Sugiyono. (2010). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet.
- Hani, Handoko. (2013). *Manajemen*. Yogyakarta.
- Yohannes, Yahya. (2016). *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha ilmu.

Jurnal

- Bagus Laksana, Hari, dkk. (2015). “*Pengaruh Kompetensi, Independensi, Pengalaman Kerja, Kompleksitas Tugas Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah Dan Reward Sebagai Variabel Moderating*”, Jurnal Sorot. Volume 10 Nomor 1.
- Publica. (2018). *Jurnal Administrasi Pembangunan dan kebijakan publik*, Volume 9 Nomor 2.
- Nina Trisnawati, dkk. (2018). “*analisis efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan inspektorat daerah di kabupaten konawe*”, Jurnal administrasi pembangunan dan kebijakan publik. Volume 9, Nomor 2.

Undang-undang

- Peraturan Pemerintah daerah kabupaten muara enim No. 25 Tahun 2017 tentang tugas dan fungsi badan perencanaan dan pembangunan daerah. Pada bagian perencanaan dan pembangunan bupati muara enim.

Peraturan Pemerintah daerah kabupaten muara enim No.2 Tahun 2020 tentang pembagian wilayah pengawasan inspektorat kabupaten muara enim.

Peraturan pemerintah daerah undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dalam mengatur otonomi daerah nya masing-masing dalam meningkatkan urusan pemerintahan daerah.

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980. Tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II.

Internet

JDIH BPK RI. <https://peraturan.bpk.go.id/>, diakses pada tanggal 14 oktober 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/wilayah.html>, diakses pada tanggal 29 september 2020.

Kementerian Keuangan. <https://jdih.kemenkeu.go.id>, diakses pada tanggal 15 oktober 2020.

JDIH BPK RI. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Detailis/147291/perbup-kab-muara-enim-no-2-tahun-2020>, diakses pada tanggal 7 november 2020.

DPMPTSP Muara Enim www.dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id diakses pada tanggal 4 november 2020.

Sumeks.CO, <https://sumeks.co/jalan-perusahaan-minim-serap-tenaga%20lokal> diakses pada tanggal 2 november 2020.

SCRIBD, <https://id.scribd.com/document/4496098/BAB-1-docx>. Diakses pada tanggal 3 desember 2020.

SumateraNews,<https://www.geogle.com/sumateranews.co.id/tim-inspektorat-muara-enim-turun-cek-fisik-bangunan-desa-pinang-banjar-2016-2019/>. Diakses pada tanggal 9 desember 2020.

\MUARAENIM,<https://www.muaraenimkab.go.id/web/content/12/geografis>.
Di akses Pada tanggal 28 januari 2021.

Wikipedia,<https://www.muaraenimkab.go.id> Diakses pada tanggal 29 januari 2021.

Portal Resmi Pemerintah, <https://www.muaraenimkab.go.id>. Diakses pada tanggal 29 januari 2021.

IDalamat,<https://idalamat.com/alamat/15044/bappeda-kabupaten-muara-enim>. Diakses pada tanggal 31 januari 2021.

Portal resmi pemerintah, <https://www.muaraenimkab.go.id> tentang rencana kerja pemerintah daerah tahun 2021. Pada tanggal 30 januari 2021.

LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

Assalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Selamat siang pak dan ibu, sebelumnya saya ucapkan terimakasih banyak atas waktu yang telah di berikan kepada saya dalam kesempatan kali ini. Baiklah pak/ibu sebelumnya perkenalkan nama saya Lensi santika. Saya dari universitas islam negeri raden fatah Palembang. Disini saya sedang melakukan penelitian skripsi tentang Efektivitas pengawasan inspektorat terhadap kinerja badan perencanaan dan pembangunan daerah dalam pembangunan infrastruktur jalan di kabupaten Muara Enim. Sehubungan Dengan dikeluarkannya PERBUP No.02 tahun 2020 yang membahas mengenai pembagian wilayah pengawasan inspektorat kabupaten Muara Enim. Isi dari pada PERBUP itu Meliputi 4 bagian wilayah pembantu inspektur pembagian wilayah pengawasan inspektorat dan pada inspektur pembantu wilayah bagian 4 pada badan perencanaan dan pembangunan daerah yang membahas masalah pembangunan di seluruh kabupaten Muara Enim termasuk lah permasalahan perencanaan dalam melakukan rencana pembangunan infrastruktur jalan. Sedangkan Pengertian dari BAPPEDA itu sendiri ialah Badan Perencanaan pembangunan daerah merupakan lembaga teknis daerah di bidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah. dapat disimpulkan juga sebagai suatu badan yang dibentuk oleh pemerintah daerah dengan memiliki tugas dan fungsi untuk menjalankan tugasnya dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah dengan tujuan untuk memperbaiki pembangunan. Adapun beberapa fungsi kerja badan perencanaan pembangunan daerah sebagai berikut : Mempunyai fungsi penyelenggaraan penelitian dibidang pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka pengembangan pembangunan secara umum. Penyusunan pola dasar pembangunan daerah, Penyusunan program tahunan daerah, Pengkoordinasian perumusan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pemantauan dan evaluasi penelitian dan perencanaan pembangunan daerah. Dalam hal pembangunan daerah, berdasarkan hasil dari Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim melakukan kegiatan Reses Tahap I Tahun 2020 guna menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Hasilnya, pembangunan Infrastruktur jalan masih menjadi permasalahan dominan yang dikeluhkan masyarakat. Hal itu tertuang dalam sidang paripurna agenda laporan hasil pelaksanaan reses tahap I tahun 2020 oleh setiap daerah pemilihan (dapil) yang digelar di gedung

DPRD Muara Enim. Berdasarkan permasalahan yang ada maka kita perlu mengetahui apakah sudah efektifitas pelaksanaan pengawasan inspektorat terhadap kinerja BAPPEDA untuk itu saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak BAPPEDA selaku badan yang melakukan perencanaan pembangunan dalam hal rencana pembangunan infrastruktur jalan di kabupaten muara Enim. Berdasarkan kerangka teori yang saya gunakan dalam penelitian skripsi ini dimana untuk mencapai pengawasan yang dapat di katakan sudah efektifitas jika sudah terdapat beberapa poin diantaranya: ketepatan penentuan waktu, Perhitungan biaya, ketepatan dalam pengukuran, Menentukan pilihan, Ketepatan berfikir, Ketepatan dalam melakukan perintah, Ketepatan dalam menentukan tujuan, Ketepatan-ketepatan sasaran. Adapun beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada bapak/ibu dalam penelitian saya kali ini yang berhubungan dengan judul saya yaitu Efektivitas pengawasan inspektorat terhadap kinerja badan perencanaan dan pembangunan daerah dalam pembangunan infrastruktur jalan di kabupaten Muara Enim.

PEDOMAN WAWANCARA PADA LEMBAGA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN MUARA ENIM

- 1. Apa saja isi dari pada perencanaan infrastruktur jalan yang telah di tetapkan di periode 2018-2023 di kabupaten Muara Enim.?**
- 2. Di tahun 2019-2020 berapa lama jangka waktu yang di perlukan dalam menyusun perencanaan pembangunan infrastruktur jalan di kabupaten Muara Enim.?**
- 3. Bagaimana dalam ketepatan dalam perencanaan infrastruktur jalan baik dalam proses awal- proses di akhir sebuah perencanaan yang telah di tetapkan.?**
- 4. Menurut pihak Bappeda sendiri apakah perencanaan infrastruktur jalan yang telah di tetapkan sudah tepat sarannya dan sesuai dengan hasil yang di kerjakan di lapangan.?**
- 5. Sebagai suatu lembaga perencanaan langkah apa saja yang akan dilakukan untuk mengukur keberhasilan dari pada perencanaan infrastruktur jalan tersebut.?**
- 6. Adakah evaluasi dan monitoring dari pihak Bappeda sebelum dan sesudah menyusun perencanaan tersebut.?**
- 7. Dalam melakukan perencanaan infrastruktur jalan berapakah anggaran pembangunan infrastruktur jalan setiap pertahunnya.?**
- 8. Serta apa saja yang menjadi pembiayaan dalam penyusunan perencanaan infrastruktur jalan tersebut.?**

9. Kendala dalam proses penyusunan dan penetapan perencanaan infrastruktur jalan.?
10. Apa yang perlu di perbaiki untuk kedepannya mengenai perencanaan infrastruktur jalan di kabupaten Muara Enim.?

**DATA INFORMAN WAWANCARA DI KANTOR BAPPEDA
KABUPATEN MUARA ENIM**

NAMA	JABATAN
YULIA	Ketua bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
ANDRIAN	Bidang Analisis dan Data
Reni	Sekretaris di Kantor Bappeda

**PEDOMAN WAWANCARA DI KANTOR INSPEKTORAT
KABUPATEN MUARA ENIM**

1. Apa saja proses pengawasan yang di lakukan Inspektorat terhadap kinerja Bappeda dalam melakukan perencanaan infrastruktur jalan di periode 2018-2023.?
2. Apa saja standar pengukuran kinerja yang di lakukan inspektorat dalam melakukan pengawasan fungsional.?
3. Bagaimana inspektorat mengukur keberhasilan kinerja Bappeda dalam melakukan perencanaan setiap tahunnya.?
4. Faktor pendukung dan penghambat dalam Inspektorat melakukan pengawasan.?
5. Bagaimana hasil rekapitulasi laporan hasil pengawasan terhadap perencanaan di tahun 2019-2020.?
6. Untuk di tahun berikutnya apa langkah Inspektorat dalam melakukan pengawasan agar lebih efektif.?
7. Dalam satu tahun berapa kali inspektorat melakukan pengawasan.?
8. Proses Inspektorat melakukan pengawasan terhadap perencanaan infrastruktur jalan .?
9. Apakah yang Inspektorat ketahui mengenai perencanaan infrastruktur jalan di kabupaten Muara Enim.?

10. Strategi yang akan di lakukan untuk meningkatkan kinerja inspektorat dalam melakukan pengawasan terhadap perencanaan infrastruktur jalan di kabupaten Muara Enim.?

**DATA INFORMAN WAWANCARA DI KANTOR
INSPEKTORAT MUARA ENIM**

NAMA	JABATAN
YETI	AUDITOR MADYA DIKANTOR INSPEKTORAT
AGUS WIJAYA	AUDITOR MUDA
RIZA	KETUA BAGIAN PERENCANAAN PENGAWASAN DI KANTOR INSPEKTORAT

Wawancara dengan ketua bidang perencanaan pengawasan di kantor inspektorat kabupaten Muara Enim yaitu bapak Riza



Wawancara dengan bidang Pengawasan Auditor Inspektorat yaitu Ibu Yeti selaku Auditor Madya (Pengendali Teknis) di Kabupaten Muara Enim.



Foto Bersama Ibu Yeti selaku Auditor Madya di Kantor Inspektorat



Wawancara dengan bagian Auditor Muda (Ketua Tim) Bapak Agus Wijaya



Wawancara dengan Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan Ibu Yulia di Kantor Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim



Wawancara dengan bidang Analisis dan Data Bapak Andrian di Kantor Bappeda Kabupaten Muara Enim.





FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Pkri No. 1 KM. 3,5 Palembang, 30126
Telp. (0711)35276 website: www.radenfatah.ac.id



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : LENSİ SANTIKA
NIM : 1710702008
Judul : Efektivitas pengawasan inspektorat terhadap kinerja badan perencanaan dan pembangunan daerah dalam perencanaan Infrastruktur jalan di kabupaten Muara Enim
Dosen Pembimbing : TAUFİK AKHYAR M.Si

No	Tanggal	Topik	Catatan Pembimbing
1	2021-02-03 11:26:27	Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf sebelumnya Bu,pak mengganggu waktunya, ini Lensi Santika. Lensi mau mengirimkan bimbingan bab 2 Bu,pak kepada bapak dan ibu selaku pembimbing 1 dan 2, kalau kira nya bapak dan ibu lagi ada waktu luang mohon di periksa ya pak,bu	Lanjut bab berikut
2	2021-02-03 11:44:00	Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak, selamat siang. Sebelumnya mohon maaf telah mengganggu waktu nya bapak. Saya Lensi Santika, ini Lensi mau mengirimkan bimbingan Skripsi Bab 1,2 dan 3 pak. Kalau bapak lagi ada waktu luang mohon diperiksa ya pak mohon arahnya dan bimbingan nya juga pak dalam penulisan skripsi lensi ini.sebelumnya lensi ucapkan terimakasih bapak, Wassalamualaikum wr.wb	Perbaiki....lanjut bab berikut..
3	2021-06-10 10:24:21	Assalamualaikum bapak, mohon maaf telah mengganggu waktu nya bapak. Ini Lensi mau mengirimkan bimbingan revisian skripsi Bab 1,2 dan 3 nya pak.kalau bapak lagi ada waktu luang mohon di periksa ya pak, serta mohon arahan dan bimbingan nya bapak dalam penulisan skripsi lensi ini	Perbaiki sesuai koreksi
4	2021-06-24 14:39:23	Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mohon maaf pak mengganggu waktu nya ini Lensi Santika, izin pak Lensi mau mengirimkan bimbingan skripsi bab 1-5 pak mohon kira nya kalau pak lagi ada waktu luang mohon di periksa ya pak, terimakasih pak.	SK. Dosen Pembimbing dan Lembar Bimbingan kirimkan di No WA Bpk yo. 085267168370
5	2021-06-24 16:02:10	Assalamualaikum pak, izin mengirimkan revisian full bab sesuai arahan pak kemarin. Setelah bimbingan offline dan pak ACC kemarin	- B. Inspektorat Kab. Muara Enjm. - Lihat pedoman penulisan daftar pustaka
6	2021-07-12 13:00:56	Assalamualaikum pak, selamat siang sebelumnya mohon maaf pak telah mengganggu waktu nya, izin pak Lensi ingin mengirimkan bimbingan revisi skripsi sesuai arahan pak kemarin di bagian daftar pustaka nya sudah lensi perbaiki pak, terimakasih sebelumnya pak. Wassalamualaikum wr.wb	Skripsinya sdh di ACC.....dan silahkan lanjut dengan proses berikutnya



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No. 1 KM. 3,5 Palembang, 30126
Telp. (0711)35276 website: www.radenfatah.ac.id



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : LENSİ SANTIKA
NIM : 1710702008
Judul : Efektivitas pengawasan Inspektorat terhadap kinerja Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah dalam perencanaan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Muara Enim
Dosen Pembimbing : RENİ APRIANI S.Ip.

No	Tanggal	Topik	Catatan Pembimbing
1	2021-01-08 12:27:05	Assalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf sebelumnya Bu,pak mengganggu waktunya, ini Lensi Santika. Lensi mau mengirimkan bimbingan bab 2 Bu,pak kepada bapak dan ibu selaku pembimbing 1 dan 2, kalau kira nya bapak dan ibu lagi ada waktu luang mohon di periksa ya pak,bu	Setiap bimbingan di upload file skripsi dr bab awal smpai thap bimbingan
2	2021-01-15 16:33:22	Assalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu, mohon maaf telah mengganggu waktu nya ini Lensi Santika.mohon izin Bu Lensi mau mengirimkan file skripsi Bab 1 yang sudah di ACC kemarin. Terimakasih sebelumnya bu. Wassalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh.	Penyusunan latarbelakang di tambahkan unsur bidang ilmu politik, dan tambahkan juga bberapa teori utk penjelasan kerangka teori
3	2021-02-11 10:25:12	Assalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu, selamat pagi.Mohon maaf telah mengganggu waktu nya ibu. Ini Lensi Santika Bu, Lensi mau bimbingan skripsi bab 1,2 dan 3 bu. kalau sekira nya ibu lagi ada waktu luang mohon di periksa ya bu serta mohon arahan nya Bu dan bimbingan nya dalam penulisan skripsi lensi ini Bu, sebelumnya lensi ucapkan terimakasih ibu	Belum adanya perubahan di teknik penulisan (terlihat jelas msh ada simbol yg di pakai, penulisan nama wilayah blm mmkai huruf kapital). Sediakan pedoman wawancara sebelum penelitian ke lapangan
4	2021-03-09 10:48:26	Assalammualaikum wr.wb. Bu mohon maaf telah mengganggu waktu nya ibu. Ini Lensi Santika Bu, Lensi mau mengirimkan bimbingan skripsi Bab 1-3 yang sudah Lensi revisi Bu. Dan untuk Pedoman wawancara nya sudah Lensi kirimkan ke ibu melalui WhatsApp dan untuk surat izin penelitian nya telah lensi ajukan di silayak UIN Raden Fatah bu. Terimakasih Bu atas bimbingan nya selalu. Wassalammualaikum wr.wb	Perbaiki sesuai pada saat bimbingan offline kmrn, mulailah lakukan penelitian ke lapangan

5	2021-05-31 13:12:08	Assalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sebelumnya mohon maaf Bu telah mengganggu waktunya. Saya Lensi Santika, ini Lensi mau bimbingan skripsi Bab 1-5 dengan ibu selaku dospem 2 Lensi Bu. Mohon arahan dan bimbingan nya selalu Bu terkait skripsi Lensi ini	Perbaiki analisis bab hasil. Masukan semua data yg sdh di dpt dg mnganalisis brdsarkan teorinya
6	2021-06-08 14:34:42	Assalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat pagi Bu. Mohon maaf telah mengganggu waktu nya izin Bu lensi mau mengirimkan bimbingan revisi bab 1-5 nya. Kalau kira nya ibu lagi ada waktu luang mohon di periksa ya Bu, serta mohon bimbingan dan arahan nya selalu Bu terkait skripsi Lensi ini. Sebelumnya lensi ucapkan terimakasih Bu	Perdalam kembali analisis bab hasil tiap indikatornya, perbaiki kesimpulan(kesimpulan hrs mnjwb perumusan msalah), buat abstrak
7	2021-06-22 10:24:05	Assalammualaikum wr.wb Bu, selamat pagi. Mohon maaf telah mengganggu waktunya bu, Ini Lensi Santika Bu, izin Bu mengirimkan revisian skripsi yang sudah lensi perbaiki sesuai arahan ibu pada saat bimbingan offline kemarin. Kalau ibu lagi ada waktu luang mohon di periksa ya Bu	Acc keseluruhan, silahkan mendaftar ke ujian komprehensif
8	2021-07-22 10:26:23	Assalammualaikum Bu, selamat pagi. Mohon maaf mengganggu waktu nya bu	ACC Ke Ujian Munaqosah



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B. 423 /Un.09/VIII/PP.01/12/2020
Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG**

- MENIMBANG**
1. Bahwa untuk dapat menyusun skripsi yang baik, mahasiswa perlu dibimbing oleh tenaga ahli sebagai dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa dalam rangka penyelesaian penyusunan Skripsi.
 2. Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan.
 3. Lembar persetujuan judul dan penunjukan Pembimbing Skripsi oleh Ketua Prodi Ilmu Politik a.n. *Lensi Santika*, tanggal 28 September 2020

- MENGINGAT :**
1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 53 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
 2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 407 tahun 2000;
 3. Instruksi Direktur Lembaga Islam Departemen RI Nomor KEP/IE/PP.03.9/147/1985 tanggal 5 Juni 1985 tentang pelaksanaan SKS dan Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah;
 4. Instruksi Menteri Agama RI No.B/152/1994 tentang Pelaksanaan SKS Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah;
 5. Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Raden Fatah No. LXXV tahun 2004;
 6. Kep.Menag RI No. 62 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama

: Menunjuk Saudara:

N A M A	NIP/NIDN	Sebagai
Taufik Akhyar, M.Si.	197101932000031003	Pembimbing I
Renli Apriani, M.Si.	2021049401	Pembimbing II

Dosen Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masing-masing sebagai Pembimbing pertama dan Pembimbing kedua Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Saudara;

N a m a : Lensi Santika
N I M : 1710702008
Prodi : Ilmu Politik

Judul Skripsi :

"Efektivitas Pengawasan Inspektorat terhadap Kinerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Muara Enim."

Masa bimbingan : Satu Tahun TMT. 2 Desember 2020 s/d 2 Desember 2021

Kedua : Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberi hak sepenuhnya untuk merevisi Judul/Kerangka Skripsi tersebut tanpa mengubah substansi penelitian.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah/dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Tembusan:

1. Rektor;
2. Dosen Penasehat Akademik yang bersangkutan
3. Pembimbing Skripsi (1 dan 2);
4. Ketua Prodi Ilmu Politik;
5. Arsip;





**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)**

Nomor : B. 270/Un.09/VIII/TL.01/02/2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Kepada Yth

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Muara Enim

Di

Muara Enim

Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Dalam rangka menyelesaikan penulisan Karya ilmiah berupa Skripsi/makalah mahasiswa kami :

Nama : Lensi Santika
Alamat : Desa Mekar Jaya Kec. Lubai Ulu Kabupaten Muara Enim.
NIM : 1710702008
Semester : VII (Tujuh)
Prodi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Raden Fatah Palembang
Judul Skripsi : *Efektivitas Pengawasan Inspektorat terhadap Kinerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Muara Enim.*

Sehubungan dengan itu kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melaksanakan Penelitian pada dua instansi terkait

Demikianlah, harapan kami dan atas segala bantuan serta perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Tertuduh

1. Yth. Kepala Kami Inspektorat Kab. Muara Enim
2. Yth. Kepala BAPPEDA Kab. Muara Enim
3. Yth. Kepala Ilmu Politik
4. Mahasiswa yang bersangkutan
5. Anng

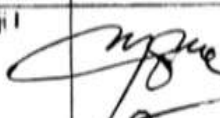

Palembang, 18 Februari 2021



**LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN
SKRIPSI**

Nama : Lensi Santika
NIM : 1710702008
Program Studi : Ilmu Politik
Tanggal Ujian Munaqosah : 03 Agustus 2021
Judul Skripsi : Efektivitas Pengawasan Inspektorat Terhadap Kinerja Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Dalam Perencanaan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Muara Enim

TELAH DI REVISI SESUAI MASUKAN DAN SARAN PADA SAAT
UJIAN MUNAQOSAH DAN TELAH DISETUJUI OLEH DOSEN PENGUJI
I DAN DOSEN PENGUJI II.

NO	NAMA DOSEN PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Prof Dr H Izumuddin, M.A	Penguji I	
2	Yulion Zalpa, M.A	Penguji II	

Palembang, 15 Agustus 2021

Menyetujui,


Dr. Triatik Akhyar, M.Si
Dosen Pembimbing I


Reny Apriani, M.Si
Dosen Pembimbing II



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3,5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI



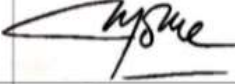

Pada hari ini Selasa tanggal 3 bulan Agustus tahun 2021 telah dilaksanakan sidang ujian skripsi atas nama mahasiswa :

Nama : Lensi Santika
Nomor Induk Mahasiswa : 1710702008
Jurusan/Program Studi : Ilmu Politik
Judul Skripsi : *Efektivitas Pengawasan Inspektorat Terhadap Kinerja Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Dalam Perencanaan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Muara Enim*

MEMUTUSKAN

1. Setelah mengumpulkan Nilai Teori dan hasil Munaqasyah pada sidang yang telah diselenggarakan maka saudara teruji dinyatakan LULUS / ~~TIDAK LULUS~~, dengan Indeks Prestasi Kumulatif ---. Oleh karena itu saudara berhak memakai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Sarjana Sosial (S.Sos).
2. Perbaiki dengan tim penguji selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum penutupan pendaftaran wisuda terhitung sejak ditetapkan.
3. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan poin di atas, maka dinyatakan belum bisa diikutsertakan mengikuti wisuda yang diselenggarakan pada periode berjalan.
4. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagai mana mestinya.

Tim Penguji:

No.	Tim Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Taufik Akhyar, M.Si.	Pembimbing I	
2	Reni Apriani, M.Si.	Pembimbing II	
3	Prof. Dr. H. Izomiddin, MA.	Penguji I	
4	Yulion Zalpa, MA.	Penguji II	



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal 3 Agustus 2021

Ketua

Dr. Eti Yusnita, S.Ag., M.HI.
NIP. 197409242007012016

Sekretaris

Ryllian Chandra Eka Viana, MA.
NIP. 198604052019031011



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

SURAT KETERANGAN

Ketua Sidang Munaqasyah Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial UIN Raden Fatah Palembang dengan ini menerangkan :

Nama : Lensi Santika
Nomor Induk Mahasiswa : 1710702008
Jurusan/Program Studi : Ilmu Politik
Judul Skripsi : *Efektivitas Pengawasan Inspektorat Terhadap Kinerja Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Dalam Perencanaan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Muara Enim*

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 setelah melalui sidang maka dinyatakan LULUS / ~~TIDAK LULUS~~ dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) ____

Palembang, 3 Agustus 2021
Ketua Sidang

Dr. Eri Yusnita, S.Ag., M.HI.
NIP. 197409242007012016

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Lensi Santika
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat & Tanggal Lahir : Mekar Jaya, 21 Maret 1999
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Ds. Mekar Jaya Kec. Lubai Ulu Kab. Muara Enim
No Telp/Hp : 081271448760

PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 23 Lubai
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 02 Lubai
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 01 Lubai
4. Tercatat sebagai mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik dalam penyelesaian tugas akhir

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya

Saya yang bersangkutan

Lensi Santika

1710702008